

**ANALISIS PENYEBAB KETIDAKSTABILAN KONFLIK
SEMENANJUNG KOREA PASCA DEKLARASI PANMUNJOM**

TAHUN 2018-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DANIATUSSALMA TALITHA ALIFA

NIM

20323003

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

**ANALISIS PENYEBAB KETIDAKSTABILAN KONFLIK
SEMENANJUNG KOREA PASCA DEKLARASI PANMUNJOM
TAHUN 2018-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DANIATUSSALMA TALITHA ALIFA

NIM

20323003

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENYEBAB KETIDAKSTABILAN KONFLIK
SEMENANJUNG KOREA PASCA DEKLARASI PANMUNJOM
TAHUN 2018-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



مجلس التفتيش
Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

Karina
Rizki Dian Nursita
Enggar Furi Herdianto

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

22 Februari 2024

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METER TEMBAL', and the serial number 'BBDA8ALX038336248'. The signature is written in black ink over the stamp.

Daniatussalma Talitha Alifa

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VII
ABSTRAK	VIII
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	4
1.4 CAKUPAN PENELITIAN	5
1.5 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
1.6 KERANGKA PEMIKIRAN	10
1.7 ARGUMEN SEMENTARA	12
1.8 METODE PENELITIAN	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>14</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian.....</i>	<i>14</i>
1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	14
BAB 2 KEDEKATAN GEOGRAFIS DAN ANARKISMA KAWASAN DALAM DINAMIKA KONFLIK SEMENANJUNG KOREA PASCA DEKLARASI PANMUNJOM	16
2.1. KEDEKATAN GEOGRAFIS DALAM KONTEKS KONFLIK SEMENANJUNG KOREA	17
<i>2.1.1 Keberadaan Garis DMZ Sebagai Faktor Internal Dalam Kedekatan Geografis.....</i>	<i>17</i>
<i>2.1.2 Posisi Semenanjung Korea Sebagai Faktor Eksternal Dalam Kedekatan Geografis.....</i>	<i>23</i>

2.2 ANARKISME KAWASAN DALAM KONTEKS KONFLIK SEMENANJUNG KOREA	26
2.2.1 <i>Anarkisme Kawasan dalam Konteks Internal</i>	26
2.2.2 <i>Anarkisme Kawasan dalam Konteks Eksternal.....</i>	33
BAB 3 POLARITAS KEKUATAN DAN KONSTRUKSI SOSIAL DALAM DINAMIKA KONFLIK SEMENANJUNG KOREA PASCA DEKLARASI PANMUMJOM	35
3.1 POLARITAS KEKUATAN DALAM KONTEKS KONFLIK SEMENANJUNG KOREA	36
3.1.1 <i>Ketidakseimbangan Militer Dua Korea Sebagai Faktor Internal Polaritas Kekuatan.....</i>	36
3.1.2 <i>Persaingan Aliansi Dua Korea Sebagai Faktor Eksternal Polaritas Kekuatan.....</i>	39
3.2 KONSTRUKSI SOSIAL DALAM KONTEKS KONFLIK SEMENANJUNG KOREA	44
3.2.1 <i>Kompleksitas Hubungan Inter-Korea Sebagai Faktor Internal Konstruksi Sosial.....</i>	44
3.2.2 <i>Intervensi Asing Sebagai Faktor Eksternal Konstruksi Sosial.....</i>	48
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1 KESIMPULAN	53
4.2 REKOMENDASI	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Operasionalisasi Teori <i>Regional Security Complex</i>	61
---	-----------

ABSTRAK

Semenanjung Korea merupakan sebuah wilayah strategis di kawasan Asia Timur yang terbagi menjadi dua bagian pasca terjadinya Perang Korea, tahun 1950 silam. Korea Selatan dan Korea Utara seringkali terlibat tensi ketegangan kawasan yang tidak stabil akibat dari berbagai faktor yang melatarbelakangi. Berbagai kebijakan reunifikasi telah diupayakan sebagai bentuk dukungan realisasi rezim perdamaian abadi Semenanjung Korea. Salah satunya dengan penandatanganan perjanjian perdamaian Deklarasi Panmunjom pada tahun 2018. Akan tetapi, peran eksistensi Deklarasi Panmunjom belum optimal dalam mereda tensi ketegangan Semenanjung Korea. Terbukti hingga kini perpecahan dan ketidakstabilan konflik masih kental menggambarkan situasi dua Korea. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mencari jawaban atas rumusan masalah yang ada yaitu, mengapa konflik Semenanjung Korea masih dihadapkan pada ketidakstabilan pasca Deklarasi Panmunjom tahun 2018-2023. Ketika menjawab rumusan masalah penulis akan menggunakan pisau teori *Regional Security Complex* milik Buzan, dkk. Secara garis besar, alasan penyebab ketidakstabilan konflik pasca Deklarasi Panmunjom mencakup faktor-faktor kompleks yang melibatkan kepentingan politik, ideologi dan geopolitik.

Kata Kunci: Semenanjung Korea, Deklarasi Panmunjom, Korea Utara, Korea Selatan, Ketegangan, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Teori *Regional Security Complex*

ABSTRACT

The Korean Peninsula is a strategic region in East Asia which was divided into two parts after the Korean War in 1950. South Korea and North Korea are often involved in unstable regional tensions due to various background factors. Various reunification policies have been pursued as a form of support for the realization of a lasting peace regime on the Korean Peninsula. One of them was the signing of the Panmunjom Declaration peace agreement in 2018. However, the role of the existence of the Panmunjom Declaration has not been optimal in reducing tensions on the Korean Peninsula. It has been proven that until now the division and instability of the conflict still strongly describes the situation of the two Koreas. For this reason, in this research the author seeks answers to the existing problem formulation, namely, why the Korean Peninsula conflict is still faced with instability after the 2018-2022 Panmunjom Declaration. When answering the problem formulation the author will use a theoretical knife *Regional Security Complex* courtesy of Buzan, et al. In general, the reasons for the instability of the conflict after the Panmunjom Declaration included complex factors involving political, ideological and geopolitical interests.

Keywords: Korean Peninsula, Panmunjom Declaration, North Korea, South Korea, Tensions, Internal Factors, External Factors, Theory *Regional Security Complex*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenanjung Korea merupakan sebuah wilayah strategis di kawasan Asia Timur yang terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Meskipun berada di dalam satu kawasan yang sama, dua Korea tidak memiliki jalinan hubungan yang baik satu sama lain, bahkan sering terlibat dalam kompleksitas konflik. Kompleksitas sendiri merujuk pada tingkat kerumitan dan beragamnya faktor yang terlibat dalam suatu konflik. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti sejarah, budaya, politik, ekonomi dan identitas yang mempengaruhi sifat serta perkembangan konflik tersebut. Dalam hal ini, kompleksitas konflik tidak selalu diukur dari jumlah korban yang banyak. Dimana kecurigaan yang muncul dapat menjadi indikator penting dari tingkat kompleksitas suatu situasi.

Dalam konteks Semenanjung Korea, salah satu aspek yang berkontribusi dalam dinamika konflik adalah tingginya tingkat kecurigaan dan ketidakpercayaan antara kedua belah pihak, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan, serta negara-negara lain yang terlibat dalam isu ini. Faktor-faktor yang terbentuk akibat sejarah konflik telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di antara mereka. Jika ditinjau secara historis, ketegangan hubungan antar negara Semenanjung Korea memiliki sejarah yang panjang di berbagai aspek, salah satu pemicu ketegangan dilatar belakangi oleh adanya perbedaan ideologi, serta berbagai tuntutan atas wilayah Korea yang saling bertentangan antara kedua negara (Aldikawati 2015).

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan kondisi hubungan antara kedua negara Semenanjung Korea berangsur membaik, meski hakikatnya konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara tetap tidak dapat dihindari. Mulai menurunnya tensi ketegangan antara kedua negara Korea, turut diperkuat dengan kegigihan peran Moon Jae In yang membawa misi perubahan bagi peningkatan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara menjadi lebih baik kedepannya. Di bawah kepemimpinan diktator Kim Jong Un, Korea Utara meneruskan rezim otoriter dengan kontrol ketat atas rakyatnya. Dalam konteks ini, Korea Utara justru menitik pusatkan pada pengembangan program senjata nuklir. Hal tersebut mengakibatkan negara ini seringkali terlibat dalam ketegangan diplomatik tingkat tinggi dengan negara lain (Monday, et.al 2022).

Pada tanggal 27 April 2018, kedua pemimpin tertinggi Semenanjung Korea melakukan pertemuan KTT di Area Keamanan Bersama di Korea Zona Demiliterisasi (DMZ), tepatnya di *Peace House Joint Security Area (JSA)*, Panmunjom. Pertemuan antara Presiden Moon Jae In sebagai perwakilan dari Korea Selatan dan Presiden Kim Jong Un menjadi perwakilan Korea Utara, menandai puncak sejarah untuk pertama kalinya dalam satu dekade seorang pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di wilayah Korea Selatan, sejak terjadinya Perang Korea. Dimana momentum langka tersebut dinilai sebagai terobosan besar langkah awal dalam upaya meningkatkan hubungan baik antar-Korea. Akhir dari diskusi panjang antara kedua pemimpin Semenanjung Korea menghasilkan Deklarasi perdamaian bagi kedua negara, bernama “Deklarasi Panmunjom”, atau disebut sebagai *Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Korean Peninsula*.

Deklarasi Panmunjom dianggap sebagai tonggak sejarah yang penting dalam hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, hal ini dikarenakan penandatanganan Deklarasi Panmunjom dilakukan untuk menandai berakhirnya status perang antara kedua Korea dan diharapkan dapat merealisasikan misi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Melalui Deklarasi Panmunjom, kedua pemimpin Semenanjung Korea sepakat untuk merealisasikan tiga poin utama, seperti, mempromosikan kesejahteraan bersama serta melaksanakan penyatuan kembali kedua Korea melalui peningkatan hubungan antar-Korea, menghentikan ketegangan militer yang berpotensi menyebabkan terjadinya perang secara substansial, serta membentuk rezim perdamaian Semenanjung Korea secara permanen (Kartini 2018).

Deklarasi Panmunjom secara signifikan dianggap sebagai mediasi yang menjembatani perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya memulihkan hubungan yang telah memanas selama bertahun-tahun. Pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua Korea, membantu meredakan tensi ketegangan serta menciptakan atmosfer yang lebih baik untuk bernegosiasi lebih lanjut dalam hal mengatasi masalah-masalah yang terjadi antara kedua negara, serta diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih baik antara dua Korea dan meningkatkan intensitas kerja sama antara keduanya.

Akan tetapi, implementasi Deklarasi Panmunjom yang dibuat atas dasar harapan reunifikasi dan sebagai mediasi langkah awal perdamaian dua Korea, belum terealisasikan secara maksimal. Pada kenyataannya, situasi Semenanjung Korea masih dalam kondisi yang belum stabil, dengan tensi ketegangan yang tidak

dapat diprediksi. Konflik keduanya seringkali dihadapkan pada kompleksitas yang rumit. Terlebih adanya peralihan masa pemerintahan presiden Korea Selatan, yang kini dipimpin oleh Yoon Suk Yeol menambah kompleksitas dinamika konflik Semenanjung Korea. Berbeda halnya dengan Moon Jae In yang selalu menekankan realisasi rezim perdamaian dua Korea, di bawah kepemimpinan presiden Yoon Suk Yeol Korea Selatan dikenal memiliki jalinan hubungan yang kurang baik dengan Korea Utara, bahkan seringkali terlibat konflik ketegangan tingkat tinggi.

Adanya fakta yang menunjukkan bahwasannya Korea Selatan dan Korea Utara masih terlibat dalam tensi ketegangan yang tidak dapat diprediksi, sehingga konflik Semenanjung Korea masih dalam keadaan yang tidak stabil meski telah dilakukan penandatanganan Deklarasi Panmunjom, membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Penyebab Ketidakstabilan Konflik Semenanjung Korea Pasca Deklarasi Panmunjom Tahun 2018-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang sebelumnya telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini akan berfokus pada pembahasan terkait dengan pertanyaan “*Mengapa konflik Semenanjung Korea masih dihadapkan pada ketidakstabilan pasca Deklarasi Panmunjom tahun 2018-2023?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Jika melihat isi dari latar belakang masalah dan permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menganalisis penyebab ketidakstabilan konflik Semenanjung Korea pasca Deklarasi Panmunjom tahun 2018-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Dalam tulisan ini, penulis membatasi waktu penelitian dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwasannya pasca Deklarasi Panmunjom pada tahun 2018, hubungan yang terjalin antara Semenanjung Korea mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, kedua negara Semenanjung Korea kembali mengalami kompleksitas konflik pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Selain itu, pemilihan periode penelitian pasca Deklarasi Panmunjom, dikarenakan untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi Semenanjung Korea setelah adanya kesepakatan perdamaian. Deklarasi Panmunjom merupakan sebuah perjanjian perdamaian yang disepakati oleh Korea Selatan dan Korea Utara, dengan harapan terealisasinya reunifikasi dua Korea.

Agar pembahasan tidak terlalu melebar luas, dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengkajian mengenai bagaimana faktor-faktor regional yang bersifat internal maupun eksternal, memiliki keterkaitan kuat terhadap prospek perdamaian Semenanjung Korea dan bagaimana faktor tersebut dapat berpotensi dalam hal kompleksitas dinamika konflik dan keamanan Semenanjung Korea.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ketika menulis sebuah penelitian, dukungan informasi data serta sumber referensi dari penelitian terdahulu sangat diperlukan, guna menambah kelengkapan serta memperkuat validasi penelitian yang ditulis. Untuk itu, penulis mengkorelasikan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, terkait topik yang sama dengan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, diantaranya:

Penelitian yang telah ditulis oleh Dewi Astuti Mudji, Tino Rila Sebayang, Fathira Iftihani N, dengan judul “Motif Perilaku Korea Utara Mengingkari Deklarasi Panmunjom Ditinjau Dari *Regional Security Complex Theory*”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Tino dan Fathira menjelaskan bahwasannya, pokok dari rumusan masalah penelitian tersebut berfokus pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai bentuk pengingkaran atas kesepakatan Deklarasi Panmunjom. Dalam penelitian tersebut dijelaskan alasan Korea Utara melakukan berbagai aksi yang mengingkari Deklarasi Panmunjom, salah satunya adalah sebagai bentuk pemberontakan Korea Utara terhadap sanksi embargo dari Amerika Serikat (Mudji, Sebayang, and Noor 2022).

Walaupun dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Tino dan Fathira menggunakan kerangka pemikiran yang sama dengan penulis, yaitu teori *Regional Security Complex*, akan tetapi dalam konteks variabel yang diteliti memiliki perbedaan. Jika dalam penelitian yang dilakukan ketiganya hanya menitik fokuskan alasan mengapa Korea Utara mengingkari kesepakatan Deklarasi Panmunjom, sedangkan penelitian oleh penulis lebih memfokuskan pada pembahasan terkait alasan mengapa Semenanjung Korea masih tetap dalam tensi hubungan yang bersifat kompleks jika ditinjau dari sudut pandang Korea Utara dan Korea Selatan, sehingga berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan kawasan meski sudah dilakukannya penandatanganan Deklarasi Panmunjom.

Selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Rafika Arsyad, dengan judul “Peluang dan Hambatan Upaya Reunifikasi Pada Era Kim Jong Un”. Di dalam penelitian yang ditulis oleh Rafika, telah dijelaskan bahwasannya isu reunifikasi Semenanjung Korea telah menjadi rancangan yang sudah dibahas sejak era

kepemimpinan Presiden pertama Korea, bahkan kedua Korea telah memperjuangkan upaya reunifikasi sebanyak 7 kali, dengan melibatkan Organisasi Internasional PBB. Akan tetapi, ketidak harmonisan hubungan kedua negara Semenanjung Korea masih saja sama. Penelitian yang ditulis oleh Rafika, merupakan hasil dari pandangan yang dihasilkan oleh kacamata Korea Utara, melalui aktor pemimpin Presiden Kim Jong Il dan Kim Jong Un (Arsyad 2018).

Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Rafika Arsyad, hanya menitik fokuskan pada pandangan yang dihasilkan oleh Korea Utara terkait hambatan reunifikasi Semenanjung Korea, maka yang membedakan dengan penelitian oleh penulis adalah hasil analisis yang akan menggabungkan dua sudut pandang dua Korea, terkait alasan mengapa meskipun telah dilakukan kesepakatan perdamaian melalui Deklarasi Panmunjom, Semenanjung Korea masih dihadapkan pada kompleksitas konflik dan keamanan kawasan. Penulis menjabarkan secara komprehensif mengenai bagaimana faktor-faktor regional dapat mempengaruhi dinamika konflik Semenanjung Korea jika ditinjau dari kedua pihak negara Korea. Dimana nantinya hasil analisis tersebut penulis korelasikan dengan teori *Regional Security Complex* milik Buzan.

Selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Sofiyatul Khoiriyah, dengan judul “Analisis Kebijakan Luar Negeri Era Kepemimpinan Kim Jong Un dan Moon Jae In Terhadap Resolusi Konflik Semenanjung Korea”. Dimana di dalam penelitian ini, telah dijelaskan mengenai sejarah penyebab terjadinya krisis nuklir di kawasan Semenanjung Korea, hingga apa saja upaya yang telah dilakukan oleh kedua Korea sebagai bentuk respon dari langkah penyelesaian nuklir dan misil Semenanjung Korea, hingga solusi apa saja yang telah dihasilkan. Selain itu,

penelitian oleh Sofiyatul Khoiriyah, menggunakan tombak analisis dari pendekatan model aktor rasional oleh Graham T Allison (Khoiriyah 2020).

Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofiyatul Khoiriyah, mengkaji sejarah penyebab terjadinya krisis nuklir di kawasan Semenanjung Korea, maka yang membedakan dengan penelitian penulis adalah fokus permasalahan yang dianalisis. Dimana penelitian oleh penulis menganalisis terkait apa saja faktor yang melatarbelakangi alasan kedua negara Semenanjung Korea masih mengalami kerumitan konflik, yang pada akhirnya berimbas pada kompleksitas hubungan dan keamanan kawasan meski sudah dilakukan penandatanganan Deklarasi Panmunjom. Penelitian oleh penulis juga menekankan bagaimana keterlibatan intervensi asing mempengaruhi tensi hubungan dua Korea.

Selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Indriana Kartini, dengan judul “Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran kontribusi Deklarasi Panmunjom terhadap prospek perdamaian Kedua negara Korea, serta bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika konflik dan keamanan regional maupun internasional Semenanjung Korea. Dalam penelitian ini, lebih menekankan bagaimana situasi dan kondisi Semenanjung Korea pasca penandatanganan Deklarasi Panmunjom di era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un (Kartini 2018).

Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriana Kartini membahas mengenai bagaimana situasi dan kondisi Semenanjung Korea pasca penandatanganan Deklarasi Panmunjom pada masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In dan Kim Jong Un, maka yang membedakan dengan penelitian oleh penulis adalah fokus utama yang di analisis. Dimana penelitian oleh penulis membahas

mengenai latar belakang hambatan dalam merealisasikan reunifikasi Semenanjung Korea. Hambatan tersebut mencakup faktor-faktor regional baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, letak perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus utama analisis oleh penulis lebih menekankan faktor-faktor yang menghambat terealisasinya perjanjian perdamaian Deklarasi Panmunjom jika dilihat dari kedua sudut pandang Korea.

Dan yang terakhir penulis menggunakan sumber acuan penelitian yang ditulis oleh Putri Isnaeni Monday dan Hamdan Nafiatur Rosyida dengan judul “Motif Moon Jae In Dalam Merekonsiliasi Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara Melalui *Korean Peninsula Peace Initiative*”. Penelitian ini membahas bagaimana Moon Jae In pada akhirnya menerapkan kebijakan *Korea Peninsula Peace Initiative* terhadap Korea Utara. Pada penelitian ini membahas bagaimana sikap Moon Jae In yang menunjukkan kemajuan terhadap rekonsiliasi hubungan kedua negara Semenanjung Korea pasca terinternalisasinya prinsip perdamaian oleh Partai Demokrat (Monday, Rosyida 2022).

Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Isnaeni Monday dan Hamdan Nafiatur Rosyida membahas mengenai bagaimana kebijakan pemerintahan pada era Moon Jae In memprioritaskan pada upaya merealisasikan misi perdamaian dua Korea, melalui kebijakan *Korea Peninsula Peace Initiative*, sedangkan penelitian oleh penulis lebih memfokuskan terkait apa yang melatarbelakangi kedua Korea, masih dihadapkan pada situasi yang kompleks meski sudah dilakukan penandatanganan perjanjian perdamaian berupa Deklarasi Panmunjom, dengan berlandaskan pada faktor regional jika ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Jika dilihat secara keseluruhan meskipun secara mendasar terdapat kesamaan dalam pembahasan permasalahan, akan tetapi hasil dari sumber penelitian yang penulis lampirkan terdapat beberapa hal yang belum dibahas dalam penelitian ini, karena topik penelitian memiliki titik fokus variabel yang dianalisis dan rentan periode waktu penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penelitian yang baru dan menarik, sebab isu Semenanjung Korea merupakan sebuah konflik yang selalu diwarnai dengan dinamika ketegangan yang kompleks, meskipun beberapa kali telah dilakukan upaya reunifikasi dan pembentukan rezim perdamaian yang permanen. Salah satunya melalui penandatanganan perjanjian perdamaian berupa Deklarasi Panmunjom, yang pada kenyataannya masih belum terealisasikan secara optimal. Untuk itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Jika melihat bagaimana berbagai faktor saling berkaitan dalam memainkan peran penting terhadap kompleksitas konflik dan keamanan Semenanjung Korea, dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan penelitian ini penulis memerlukan pisau analisis berupa kerangka teoritis “*Regional Security Complex*” yang dicetuskan oleh Barry Buzan.

Teori *Regional Security Complex*, merupakan sebuah konsep teori yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Waever pada tahun 1991 dalam bidang studi keamanan internasional. Dalam kerangka *Regional Security Complex*, menegaskan bahwasannya suatu kawasan yang memiliki letak geografis saling berdekatan, maka jalinan hubungan diantara mereka akan berkaitan dan tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Teori ini mengkaji mengenai bagaimana dinamika pada setiap keamanan regional disuatu kawasan. Menurut Buzan dan Waever, *Regional Security Complex* sendiri merupakan sebuah kelompok negara dimana keamanan utamanya menyangkut hubungan bersama, sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu keadaan regional sendiri tidak dapat terhindar dari penetrasi. Penetrasi terjadi ketika kekuatan eksternal berinteraksi dengan negara-negara di dalam *Regional Security Complex*, membentuk penyesuaian di antara mereka (Buzan & Weaver 2003, 47).

Dalam teori *Regional Security Complex*, kompleksitas konflik merujuk pada keterkaitan antara berbagai elemen dan faktor yang dapat mempengaruhi dan memperumit situasi konflik. Buzan dan Waever mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur dasar kompleksitas keamanan kawasan. Faktor-faktor ini mencakup: (Buzan & Weaver 2003, 53).

1. Kedekatan geografis, yaitu lokasi di mana terbentuknya jalinan hubungan keamanan antar negara dan memiliki ikatan keterlibatan satu sama lain.
2. Anarkisme kawasan, yaitu situasi dimana tidak adanya sistem keamanan sentral yang mengatur interaksi antar negara.
3. Polaritas kekuatan, yaitu kondisi ketidakmerataan distribusi kekuatan antara negara di suatu kawasan.
4. Konstruksi sosial berupa pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan), yang terbentuk akibat dampak sejarah konflik di masa lalu.

Jika dilihat dari konsep *Regional Security Complex* milik Buzan, kompleksitas konflik dan keamanan di Semenanjung Korea, dilatarbelakangi oleh adanya faktor-faktor regional dalam konteks internal maupun eksternal, yang saling

berkaitan dan berinteraksi satu sama lain. Untuk memahami kompleksitas konflik di Semenanjung Korea, tidak cukup hanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor regional secara terpisah. Seluruh elemennya saling berkaitan dan berinteraksi dalam membentuk kompleksitas sistem keamanan regional.

1.7 Argumen Sementara

Setelah mengembangkan kerangka konseptual di atas, langkah selanjutnya yang diambil oleh penulis adalah menyampaikan hipotesis sebagai jawaban sementara untuk permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. Hipotesis ini, melibatkan hubungan antara satu atau lebih variabel yang akan dikorelasikan dengan kerangka teori yang telah dirumuskan, untuk mengetahui bagaimana relevansinya dengan hasil akhir penelitian. Untuk itu, dengan menggunakan konsep teori serta asumsi yang telah ditulis dalam penelitian ini penulis telah menemukan beberapa fakta. Dimana kompleksitas hubungan dan keamanan wilayah Semenanjung Korea dilatarbelakangi oleh beberapa faktor regional yang terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal.

Masing-masing faktor internal dan eksternal tersebut terdiri dari empat faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur dasar kompleksitas keamanan kawasan, oleh Barry Buzan. Faktor-faktor tersebut, diantaranya:

a) *Boundary* (Kedekatan Geografis):

Secara internal, letak geografis Korea selatan dan Korea Utara hanya dipisahkan oleh garis perbatasan di Zona Demiliterisasi (DMZ). Sedangkan secara eksternal, dua Korea berdekatan dengan negara China dan Jepang.

b) *Anarkisme Kawasan*:

Secara internal, anarkisme kawasan di Semenanjung Korea tercermin dari tidak adanya kekuatan yang saling mendominasi antara Korea Utara-Korea Selatan, yang membentuk sebuah hierarki. Sedangkan secara eksternal, masuknya penetrasi asing ke dalam *boundary* (batas wilayah).

c) **Polaritas Kekuatan:**

Secara internal, polaritas kekuatan di Semenanjung Korea tercermin dari adanya ketidakseimbangan kekuatan militer antara dua Korea. Sedangkan secara eksternal, adanya persaingan aliansi antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, dengan aliansi Korea Utara, Rusia dan China.

d) **Konstruksi sosial yang diperlihatkan melalui pola *Amity* (persahabatan) dan *Enmity* (permusuhan):**

Secara internal, konstruksi sosial dapat dilihat dari kompleksitas hubungan inter-Korea. Sedangkan eksternal, masuknya keterlibatan kekuatan asing yang mengintervensi.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif. Maka, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu topik penelitian secara deskriptif, sesuai dengan perspektif penulis yang diolah berdasarkan sumber-sumber data yang akurat dan relevan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Selanjutnya pada poin subjek dan objek yang digunakan dalam penelitian penulis. Dimana Korea Selatan dan Korea Utara merupakan bagian dari subjek

penelitian, sedangkan faktor regional dan Deklarasi Panmunjom merupakan objek penelitian yang penulis teliti.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk membantu memperkuat argumen dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengkajian terhadap jurnal, buku, ataupun berbagai web resmi yang relevan dengan konflik Semenanjung Korea dan Deklarasi Panmunjom, serta kerangka pemikiran yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis studi kasus.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam menulis penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, penulis memerlukan banyak sumber-sumber akurat yang berkaitan dengan topik pembahasan, untuk mengkaji dan menganalisis studi kasus penelitian. Analisis data melibatkan pemetaan faktor-faktor regional baik dalam konteks internal maupun eksternal, yang relevan dengan kompleksitas hubungan dan keamanan di Semenanjung Korea. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan dan pola yang ada antara faktor-faktor tersebut. Kemudian, setelah menelaah dan menganalisa, penulis memaparkan hasilnya ke dalam tulisan penelitian, sesuai dengan bagaimana perspektif penulis sendiri.

1.9 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan terdiri dari empat bab. Setelah Bab pertama, pada Bab kedua akan membahas terkait analisis mengapa konflik Semenanjung Korea masih tidak stabil meski sudah dilakukan penandatanganan Deklarasi Panmunjom. Dalam

menganalisis penelitian ini, akan dikorelasikan dengan teori *Regional Security Complex* milik Buzan pada poin 1 dan 2 terkait empat faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur dasar kompleksitas keamanan kawasan, yang melatarbelakangi krisis konflik dan bagaimana pengaruhnya terhadap kompleksitas hubungan dan keamanan di Semenanjung Korea, pasca Deklarasi Panmunjom tahun 2018-2023.

Pada Bab ketiga, akan membahas terkait analisis mengapa konflik Semenanjung Korea masih tidak stabil meski sudah dilakukan penandatanganan Deklarasi Panmunjom. Dalam menganalisis penelitian ini, akan dikorelasikan dengan teori *Regional Security Complex* milik Buzan pada poin 3 dan 4 terkait empat faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur dasar kompleksitas keamanan kawasan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kompleksitas hubungan dan keamanan di Semenanjung Korea, pasca Deklarasi Panmunjom tahun 2018-2023.

Skripsi ini kemudian akan ditutup dengan Bab keempat, yang berisikan kesimpulan untuk merangkum hasil dan implikasi dari temuan penelitian, serta daftar pustaka untuk mengutip sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian.

BAB 2

KEDEKATAN GEOGRAFIS DAN ANARKISME KAWASAN DALAM DINAMIKA KONFLIK SEMENANJUNG KOREA PASCA DEKLARASI PANMUNJOM

Pada bab kedua ini penulis menganalisis mengenai mengapa Semenanjung Korea masih mengalami ketidakstabilan konflik pasca kesepakatan Deklarasi Panmunjom. Untuk mengetahui alasannya, penulis mengkaji dengan menggunakan dua variabel dari teori *Regional Security Complex* oleh Buzan, meliputi kedekatan geografis serta anarkisme kawasan. Dalam dinamika konflik Semenanjung Korea pasca Deklarasi Panmunjom, faktor kedekatan geografis dan anarkisme kawasan membentuk pandangan yang kompleks. Adanya keterkaitan peristiwa sejarah, dinamika politik, faktor geografis, serta kerumitan pola interaksi yang saling terkait di wilayah ini, menciptakan ketidakpastian lanskap konflik yang terus berubah seiring waktu.

Pada aspek kedekatan geografis, minimnya jarak batas darat yang memisahkan dua Korea serta ancaman ketidakpastian senjata nuklir, menimbulkan terjadinya situasi di mana ketegangan yang tidak dapat diprediksi bisa meningkat dengan cepat. Sedangkan pada aspek anarkisme kawasan, hadirnya keterlibatan campur tangan asing dan rivalitas geopolitik, turut memainkan peran penting dalam memperumit realisasi Deklarasi Panmunjom yang mengupayakan reunifikasi dua Korea. Dalam mengkaji konflik Semenanjung Korea, teori *Regional Security Complex* memberikan pandangan mengenai bagaimana faktor kedekatan geografis dan anarkisme kawasan berkontribusi terhadap dinamika keamanan regional.

2.1. Kedekatan Geografis dalam Konteks Konflik Semenanjung Korea

2.1.1 Keberadaan Garis DMZ Sebagai Faktor Internal Dalam Kedekatan Geografis

Untuk memahami kompleksitas keamanan di wilayah Semenanjung Korea, memerlukan kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Buzan yaitu teori *Regional Security Complex* sebagai acuan dasar. *Regional Security Complex* menghadirkan kerangka analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan situasi keamanan di suatu wilayah. Di mana wilayah tersebut saling memiliki hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam teori ini, Buzan berpendapat bahwa istilah "*region*" tidak hanya mengacu pada wilayah geografis, melainkan juga mencakup konsep tentang suatu kawasan di mana proses-proses sekuritisasi, desekuritisasi dan interaksi antara negara-negara di dalamnya memiliki jalinan hubungan yang saling berkaitan. Masalah keamanan negara-negara di wilayah tersebut tidak dapat dianalisis secara terpisah. *Regional* merujuk pada sekelompok elemen yang secara geografis tergabung membentuk satu kesatuan dengan sistem dan struktur internalnya sendiri (Buzan & Waever 2003, 53).

Menurut pandangan Buzan, faktor kedekatan sangat berpengaruh terhadap keamanan karena banyak potensi ancaman lebih mudah menyebar dalam jarak yang lebih dekat jika dibandingkan dalam jarak jauh. Oleh karena itu, ketergantungan keamanan jauh lebih kuat antara negara-negara yang berada di dalam satu kawasan yang sama dibandingkan antara negara-negara di luar kawasan. Dalam teori *Regional Security Complex*, variabel-variabelnya terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Variabel internal diukur menggunakan indikator letak geografis, yang berasal dari dalam wilayah suatu negara. Dalam konteks ini, Semenanjung

Korea merupakan sebuah kawasan yang memiliki letak geografis berdekatan dan secara internal hanya dipisahkan oleh garis *Demilitarized Zone* (DMZ) (Buzan & Waever 2003, 54-55).

Letak perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang saling berdekatan, meningkatkan risiko ketegangan politik dan militer. Terciptanya atmosfer tegang di wilayah itu turut diperkuat oleh rekam jejak sejarah konflik antara kedua Korea. Pada awalnya, atas hasil kesepakatan antara Amerika Serikat dan Rusia pada akhir Perang Dunia II, Korea Selatan dan Korea Utara secara resmi terpisah menjadi dua bagian teritorial yang berbeda. Kemudian, perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953 silam, mengakibatkan terjadinya pembagian Korea menjadi dua negara yang secara internal dipisahkan oleh garis *Demilitarized Zone* (DMZ) (Oberdorfer 2001).

Terbentuknya DMZ merupakan hasil dari kesepakatan gencatan senjata di akhir waktu Perang Korea. DMZ membelah Semenanjung Korea sepanjang 248 km/155 mil dengan lebar sekitar 4 km/2,5 mill. Tepat berada di bagian tengah DMZ, terdapat Garis Demarkasi Militer/*Military Demarcation Line* (MDL). Garis demarkasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir tensi ketegangan, serta menghindari terjadinya konflik militer secara langsung antara dua Korea. Dimana dalam perjanjian gencatan senjata Semenanjung Korea, telah dijelaskan dengan rinci terkait jumlah personel militer serta persenjataan yang boleh dimiliki oleh dua negara di *Demilitarized Zone* (DMZ). Masing-masing tentara kedua Korea diperbolehkan berpatroli di dalam DMZ, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk melintasi MDL (Cho 2009).

Di dalam DMZ, terdapat kawasan bersejarah bagi upaya reunifikasi dua Korea, yaitu *Joint Security Area* (Kawasan Keamanan Bersama), Panmunjom. Tempat ini merupakan sebuah desa gencatan senjata yang mempertemukan pasukan Korea Selatan dan Korea Utara. Meski dikenal sebagai kawasan demiliterisasi, *Joint Security Area*, Panmunjom, menjadi kawasan yang berbahaya karena dipenuhi oleh ranjau darat. *Joint Security Area* merupakan tempat pertemuan diplomatik dua Korea, dimana bangunan yang berada di kawasan tersebut terhubung dengan Seoul dan Pyongyang, sehingga berbagai perundingan diantara keduanya diawasi ketat oleh pejabat di masing-masing ibu kota Korea (Times 2018).

Zona Demiliterisasi sebagai simbol *de-facto* pemisah wilayah Semenanjung Korea menjadi kawasan paling berbahaya, karena ambivalensi aktivitas militer di kedua sisi perbatasan yang tidak menentu. Pada realitanya, DMZ menjadi daerah paling termonitor dengan penjagaan super ketat. Dekatnya wilayah teritorial kedua negara yang hanya dipisahkan dengan garis perbatasan DMZ, membuat hubungan keduanya seringkali mengalami perselisihan akibat intensifnya tensi kecurigaan antara dua Korea yang terus mengintai. Kondisi ini menciptakan spekulasi mengenai niat dan tujuan masing-masing negara. Setiap langkah atau kebijakan yang diambil oleh salah satu negara sebagai bentuk *self defense*, seringkali dianggap sebagai ancaman oleh pihak lainnya.

Terpisahnya dua regional Korea pada akhirnya membentuk pola interaksi yang dipenuhi dengan ketegangan dan kecurigaan. Kecurigaan antara kedua Korea tercermin dalam langkah-langkah kebijakan yang dilakukan masing-masing negara, dengan berlandaskan perasaan waspada yang terus-menerus mewarnai

hubungan inter-Korea. Krisis kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara memicu terjadinya kontestasi militer di sepanjang DMZ. Masing-masing sisi perbatasan saling mempertahankan kontingen pasukan dalam kapasitas yang besar. Persenjataan militer yang dilengkapi perangkap tank ditempatkan untuk memberikan pengawasan ketat di kedua sisi perbatasan. Hal ini menyulut terjadinya konflik militer tingkat tinggi. Keberadaan DMZ dan ketegangan militer menciptakan risiko konflik yang dapat berdampak negatif pada pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan masyarakat yang tinggal di dekat zona konflik. Eksistensi DMZ menjadi simbol pembagian dramatis antara kedua Korea, serta mencerminkan tingginya ketegangan antara kedua negara (CNN Indonesia 2018).

Ketegangan yang menyelimuti Semenanjung Korea akibat terbentuknya DMZ dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada tahun 2020 silam, dimana Korea Selatan dan Korea Utara secara dramatis saling melepaskan tembakan di kawasan *Demilitarized Zone* (DMZ). Menurut pernyataan militer Seoul, konflik ini pada awalnya dipicu oleh tembakan yang dilepaskan pasukan militer Korea Utara ke arah pos penjagaan Korea Selatan di kota perbatasan Cheorwon. Situasi ini pada akhirnya memicu tindakan balasan oleh Korea Selatan, yang merespons dengan memberikan dua rentetan tembakan peringatan kepada Korea Utara. Kejadian ini menjadi yang pertama kali dalam rentan waktu lima tahun, di *Demilitarized Zone* (DMZ) pasukan Korea Utara melepaskan tembakan secara langsung ke kawasan Korea Selatan. Sebagai zona penyangga perdamaian dua Korea, *Demilitarized Zone* (DMZ) dibentuk atas dasar harapan untuk meminimalisir ketegangan militer. Aksi saling tembak yang dilakukan oleh kedua belah pihak Korea tersebut dianggap telah melanggar perjanjian Deklarasi Panmunjom, yang menekankan pentingnya

pengurangan ketegangan aktivitas militer antara kedua negara (BBC Indonesia 2020).

Berada di bawah kepemimpinan Moon Jae In, bertempat di *Joint Security Area* (Kawasan Keamanan Bersama), Panmunjom, pada 2018 silam pejabat Korea Selatan dan Korea Utara sepakat mengupayakan rezim perdamaian dengan melakukan penandatanganan Deklarasi Panmunjom. Disusul dengan pelenyapan berbagai persenjataan keamanan, ranjau darat, serta pos penjagaan (Times 2018). Akan tetapi pada masa peralihan pemerintahan Korea Selatan, di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol Korea Utara dan Korea Selatan lebih sering terlibat ketegangan. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi pada 2023 lalu, dimana menurut pengakuan militer Seoul, Korea Utara kembali menggerakkan pasukan militernya ke wilayah perbatasan selatan dengan tujuan mengaktifkan kembali operasional pos-pos penjagaan yang sebelumnya dinonaktifkan, berdasarkan perjanjian antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 2018 lalu (VOA 2023).

Pada hakikatnya, kedekatan geografis Semenanjung Korea menjadi elemen utama dalam membentuk dinamika konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Karena kedekatan geografis merupakan dasar yang membangun pola interaksi suatu negara. Di semenanjung Korea, hubungan keamanan antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, baik secara regional maupun global, karena kawasan yang mengikat diantara keduanya merupakan arena dimana keamanan nasional dan keamanan global saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Buzan & Waever 2003).

Kehadiran DMZ sebagai penghalang fisik yang memisahkan Korea Utara dan Selatan, menciptakan tingkat kewaspadaan yang tinggi antara kedua Korea. Kedua belah pihak merasa perlu untuk terus meningkatkan kewaspadaan dengan memantau dan bersiap menghadapi kemungkinan ancaman dari pihak lain, sehingga menambah ketegangan suasana di Semenanjung Korea. Terlebih masih adanya simbol-simbol perpecahan inter-Korea. Kedua negara mengerahkan angkatan bersenjata di sekitar DMZ, yang berpotensi menciptakan situasi di mana setiap insiden kecil dapat memicu eskalasi konflik. Hal ini menimbulkan paradoks keamanan di mana keberadaan DMZ yang semula dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran, justru menciptakan fokus defensif pemicu konflik.

Pemisahan Semenanjung Korea secara internal oleh *Demilitarized Zone* (DMZ) telah memperumit dan memperdalam konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua negara merasa terancam oleh keberadaan satu sama lain, yang menyebabkan perlombaan persenjataan dan ketegangan militer yang berkelanjutan. Situasi ini menciptakan siklus saling percaya dan ketidakpercayaan yang memperumit upaya perdamaian dan penyelesaian konflik. Keberadaan DMZ juga membatasi kemungkinan pertemuan diplomatik dan komunikasi langsung antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang menghambat dialog bilateral antar-Korea. Maka dari itu, terbelahnya Semenanjung Korea oleh garis DMZ melatarbelakangi alasan mengapa kedua Korea masih dihadapkan pada ketidakstabilan konflik, meskipun sudah dilakukan penandatanganan perjanjian perdamaian berupa Deklarasi Panmunjom.

2.1.2 Posisi Semenanjung Korea Sebagai Faktor Eksternal Dalam Kedekatan Geografis

Terjadinya sebuah ancaman akan menjadi lebih signifikan karena adanya faktor kedekatan letak geografis, karena banyak ancaman lebih mudah menyebar apabila suatu wilayah berada di lingkup jarak yang dekat. Kedekatan geografis merujuk pada lokasi di mana hubungan keamanan antar negara terbentuk dan saling memiliki keterikatan satu sama lain. Menurut Buzan, negara-negara yang berdekatan secara geografis memiliki ketergantungan keamanan satu sama lain dan dapat menghadapi masalah keamanan bersama sebagai sebuah kelompok negara. Oleh karena itu, masing-masing kelompok negara akan saling mengamati pergerakan keamanan negara tetangganya yang jaraknya saling berdekatan. Semakin dekat jarak yang memisahkan teritorial sebuah negara, maka peluang konflik akan lebih mudah terjadi, kedekatan juga akan meningkatkan interaksi keamanan antara negara tersebut.

Dalam teori *Regional Security Complex*, variabel eksternal letak geografis diukur menggunakan indikator bagaimana kedekatan jarak posisi suatu negara dengan wilayah yang berada diluar kawasan mempengaruhi kompleksitas negara tersebut. Dalam konteks ini, secara eksternal Semenanjung Korea terletak di antara China dan Jepang. Dekatnya posisi geografis Semenanjung Korea dengan Jepang dan China membuat hubungan di kawasan itu semakin rumit, hal ini dikarenakan negara-negara tersebut dikenal memiliki relevansi sejarah yang cukup kuat satu sama lain (Buzan & Weaver 2003, 46).

Sejarah konflik yang mengikat antara Semenanjung Korea dengan China dan Jepang memainkan peran sentral dalam memperumit hubungan diplomatik

ketiganya. Dimana Semenanjung Korea, China dan Jepang terlibat dalam sejarah kolonialisme dan Perang Dunia II. Selama berlangsungnya kolonialisme pada awal abad ke-20, Jepang melakukan kejahatan perang di Semenanjung Korea dan ditetapkan melanggar hukum perang internasional. Akibat dari kejadian itu, Jepang dan Semenanjung Korea masih sering terlibat ketegangan, dimana hingga kini Semenanjung Korea masih menuntut kompensasi kepada Jepang atas luka kejahatan perang di masa lalu (Cartwright 2019).

Selain dengan Jepang, Semenanjung Korea dan China juga memiliki keterkaitan sejarah yang cukup kuat. Relevansi sejarah antara Semenanjung Korea dengan China memiliki akar yang sangat dalam dan kompleks, dengan keterlibatan faktor politik, ekonomi serta budaya yang berperan. Keterikatan ini juga melibatkan hubungan kekerabatan yang telah terjalin selama beribu-ribu tahun yang lalu. Sejarah yang melibatkan Semenanjung Korea dan China membentuk dinamika yang kompleks dalam hubungan mereka hingga saat ini (CNN 2022)

Semenanjung Korea sebagai kawasan geopolitik yang penting di Asia Timur, terlibat dalam hubungan bilateral yang kompleks dengan China dan Jepang, pada aspek politik, ekonomi dan keamanan. Pada tahun 2019 lalu, Jepang terlibat perang dagang dengan Korea Selatan, yang dilatarbelakangi oleh luka Perang Dingin di masa lalu. Konflik tersebut berimbas pada saling penghapusan masing-masing negara dari daftar *whitelist* atau daftar mitra dagang favorit. Dimana situasi itu berdampak negatif karena menghambat arus perdagangan negara Semenanjung Korea. Selain itu, sngketa ekonomi tersebut turut mempengaruhi kerjasama antara Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat dalam menangani ancaman Korea Utara. Ketika hubungan antara Korea Selatan dan Jepang memburuk, hal ini dapat

menyulitkan upaya koordinasi di antara mereka dalam menghadapi ancaman regional (CNBC 2019).

Pada tahun 2023 lalu, Korea Selatan terlibat ketegangan dengan China dan Rusia. Ketegangan tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan pesawat militer China dan Rusia yang dianggap telah menerobos Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea (KADIZ). Korea Selatan memberikan respons dengan mengirimkan jet-jet tempur. Hal ini pada akhirnya memicu ketegangan kawasan, sebab China dan Rusia merupakan sekutu tradisional Korea Utara, yang bekerjasama dalam peningkatan kekuatan militer (VOA 2023).

Dalam konteks ini, letak geografis Semenanjung Korea yang berdekatan dengan China dan Jepang menjadikannya sebagai titik penting dalam geopolitik regional. Kedekatan tersebut berpeluang menimbulkan terjadinya ketegangan akibat tingginya tingkat kecurigaan di antara mereka. Dimana setiap pergerakan kebijakan serta berbagai tindakan yang dikeluarkan akan diawasi ketat oleh masing-masing negara dan apabila terdapat perbuatan yang dianggap berpotensi mengancam keamanan akan mendapat respons aktif pemicu ketegangan.

Kedekatan geografis antara kedua Korea dengan China dan Jepang membentuk pola interaksi yang tidak dapat diprediksi, sehingga membuat berbagai kemungkinan konflik mudah terjadi. Pada dasarnya, kedekatan geografis menyediakan kesempatan untuk berdialog lebih intens, akan tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko eskalasi konflik. Dengan demikian, kondisi geografis ini membentuk latar belakang kompleks yang mempengaruhi kebijakan keamanan regional dan negara-negara tersebut harus mempertimbangkan dinamika ini dalam merancang strategi kebijakan luar negeri dan keamanan mereka.

Buzan telah menekankan bahwasannya negara-negara yang berdekatan secara geografis cenderung memiliki ketergantungan keamanan satu sama lain dan masing-masing kelompok negara akan saling mengamati pergerakan keamanan negara tetangganya yang jaraknya saling berdekatan. Dalam variabel eksternal kedekatan geografis, batas wilayah negara dalam satu kawasan merujuk pada faktor-faktor yang menandai perbatasan antara negara-negara yang berdekatan dalam suatu wilayah geografis tertentu. Hubungan geografis ini dapat mempengaruhi dinamika keamanan negara-negara yang berbagi batas wilayah.

2.2 Anarkisme Kawasan dalam Konteks Konflik Semenanjung Korea

2.2.1 Anarkisme Kawasan dalam Konteks Internal

Buzan menganggap sistem internasional sebagai anarkis, namun dalam konteks regional, dipertimbangkan adanya "anarki kawasan." Anarki kawasan mencerminkan ketidakpastian dan ketidakstabilan di tingkat regional, di mana negara-negara saling terlibat persaingan dalam interaksi keamanan. Salah satu elemen yang krusial dalam membentuk kompleksitas keamanan suatu wilayah adalah keberadaan anarkisme di dalamnya. Anarkisme kawasan terbentuk karena adanya dua atau lebih entitas otonom (Buzan, Waever 2003, 40).

Anarkisme kawasan dalam konteks internal mengarah pada indikator mengenai interaksi anarki yang saling dilakukan oleh sebuah negara, akibat tidak adanya kontrol dari otoritas pemerintah yang kuat atau struktur kekuasaan yang terorganisir dengan baik dalam mengatur satu kawasan. Dalam hal interaksi antara kedua negara Semenanjung Korea, anarkisme kawasan dapat menciptakan dinamika yang kompleks. Karena tidak ada otoritas pusat yang memperantarai atau mengatur interaksi. Untuk itu, negara atau kawasan di sekitarnya akan berhadapan

dengan ketidakpastian dan risiko. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan kepentingan, persaingan kekuatan, atau sistem pertahanan keamanan (Buzan & Waever 2003, 53-54).

Anarkisme kawasan mengakibatkan terbentuknya pola hubungan keamanan yang tidak seimbang antar negara kawasan, serta selalu dipenuhi kecurigaan dan ketegangan satu sama lainnya. Dalam konteks Semenanjung Korea, anarkisme kawasan dapat dilihat dari tidak adanya kekuatan yang saling mendominasi antara Korea Utara-Korea Selatan, yang membentuk sebuah hierarki. Dalam hal ini, menjadi sebuah konflik yang dinamikanya selalu menjadi pusat perhatian internasional, Korea Selatan dan Korea Utara saling berebut atensi, terkait siapa negara yang memiliki power paling besar. Adanya keinginan masing-masing negara untuk saling berebut kepentingan dan kekuasaan menciptakan pola interaksi yang anarki. Situasi ini pada akhirnya membentuk *Balance of Power* (Buzan & Waever 2003, 53-54).

Korea Selatan memiliki posisi yang kuat di tingkat regional maupun global. Korea Selatan menjadi aktor kekuatan perekonomian global pada sektor teknologi maupun industri budaya. Keberhasilan ekonominya telah membantu menciptakan stabilitas di wilayah tersebut dengan mempromosikan perdamaian melalui kerjasama ekonomi. Selain itu, Korea Selatan merupakan negara dengan kemampuan militer terkuat di Asia Timur, bahkan dunia. Korea Selatan telah mengembangkan kemampuan militer dan teknologi keamanan yang signifikan, mencakup pertahanan sistem rudal, udara dan teknologi siber. Kekuatan militer yang kuat dapat menjadi penghalang potensial terhadap ancaman Korea Utara (Pakar 2022).

Di lain sisi, meskipun Korea Utara memiliki tingkat perekonomian jauh di bawah Korea Selatan, keberadaan negara ini dianggap mampu mengancam stabilitas keamanan Semenanjung Korea, bahkan Asia Timur dan dunia. Korea Utara telah lama menjadi sumber ketegangan di wilayah tersebut karena program senjata nuklirnya, serta retorika agresif terhadap negara-negara lain, termasuk Korea Selatan. Korea Utara merupakan negara dengan angkatan militer terbesar di dunia, dengan fokus utama pada pasukan darat dan senjata nuklir. Kehadiran militer yang kuat dan persenjataan nuklir ini menciptakan ketegangan di wilayah tersebut.

Meskipun pada dasarnya terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara dua Korea, terdapat alasan mengapa kedua negara tersebut tidak saling mendominasi satu sama lain, yang membuat tidak terbentuknya hierarki di Semenanjung Korea. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki ideologi dan sistem politik yang berbeda secara fundamental. Korea Selatan adalah negara demokratis dengan perekonomian pasar yang kuat, sementara Korea Utara adalah negara otoriter dengan ekonomi terpusat pada negara dan satu partai politik yang dominan. Perbedaan ini membuat sulit bagi salah satu negara untuk mendominasi yang lain secara langsung. Selain itu, Korea Utara telah menjadi subjek sanksi internasional yang ketat karena program nuklirnya. Sanksi-sanksi ini membatasi kemampuan Korea Utara untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan Korea Utara untuk bersaing langsung dengan Korea Selatan dalam hal dominasi regional.

Perubahan dalam dinamika politik dan kepemimpinan Korea Selatan dan Korea Utara berpotensi mempengaruhi dinamika hubungan kedua negara. Hal ini dikarenakan akan mengubah pola pendekatan terhadap hubungan antar negara.

Keterkaitan faktor-faktor ini pada akhirnya mencegah terbentuknya hierarki yang jelas antara Korea Selatan dan Korea Utara. Tidak adanya pemerintah sentral yang mengatur interaksi Korea Selatan dan Korea Utara mengakibatkan pola hubungan anarki terus berkembang antara kedua negara. Hal tersebut turut dilatarbelakangi oleh banyaknya perbedaan sifat dan orientasi kepentingan politik dua Korea. Meskipun telah terdapat berbagai kesepakatan, perundingan, hingga perjanjian damai, salah satunya adalah Deklarasi Panmunjom, kompleksitas keamanan kawasan Semenanjung Korea masih belum stabil.

2.2.2 *Anarkisme Kawasan dalam Konteks Eksternal*

Anarkisme kawasan menghasilkan ketidakseimbangan hubungan keamanan antara negara-negara di kawasan, yang selalu dipenuhi dengan rasa curiga dan ketegangan. Anarkisme kawasan menyebabkan kurangnya interaksi pertukaran informasi dalam bentuk kerjasama atau kesepakatan antarnegara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Buzan memiliki pandangan bahwasannya apabila suatu kawasan berada di dalam situasi yang anarki, negara-negara yang terlibat akan membentuk kebijakan pertahanan keamanan dan bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kondisi ini menandakan bahwa tingkat kecurigaan serta tekanan suhu persaingan yang berpotensi memicu permusuhan masih tinggi terjadi di kawasan (Buzan & Waever 2003 53-54).

Secara eksternal, anarkisme kawasan mengacu pada masuknya penetrasi dari aktor asing ke dalam suatu *boundary Regional Security Complex*, dimana pengaruh interaksi dari aktor eksternal tersebut turut berkontribusi mempengaruhi kompleksitas kawasan. Dalam hal ini negara yang memiliki kapabilitas serta power yang besar dapat melakukan penetrasi kekuatan ke kawasan lain diluar batas

geografis yang dimiliki. Indikator utama untuk menganalisis hal ini adalah melihat interaksi yang terjadi antar negara dalam kawasan, hal ini bisa berbentuk konflik maupun rivalitas antar negara dalam kawasan Semenanjung Korea pasca Deklarasi Panmunjom, yang kemudian menimbulkan adanya penetrasi pihak aktor eksternal sehingga menambah struktur anarki yang ada.

Dalam konteks ini, ketidakstabilan Semenanjung Korea disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang memainkan peran penting, seperti, ketidakpastian politik, ketegangan militer, hingga berbagai masalah keamanan regional yang lebih luas. Dalam situasi yang anarki, membuat negara-negara Semenanjung Korea lebih cenderung mencari perlindungan atau dukungan dari kekuatan besar, seperti halnya Amerika Serikat, China dan Rusia, demi meningkatkan pertahanan keamanan mereka. Tindakan ini dapat memperumit upaya reunifikasi dua Korea, apabila kepentingan keamanan regional tidak selaras di antara berbagai kekuatan besar yang mengintervensi (Buzan & Waever 2003, 54-55)

Pasca-Deklarasi Panmunjom, pergantian kepala negara yang memimpin pemerintahan masing-masing Korea dapat mempengaruhi tingkat anarkisme kawasan di Semenanjung Korea, tergantung pada kemana arah kebijakan dan bagaimana pendekatan masing-masing kepala negara terhadap konflik yang masih berlangsung. Di Korea Utara, Kim Jong-un memimpin dengan sistem otoriter yang menerapkan kebijakan "militaristik" dan mendorong pembangunan senjata nuklir sebagai prioritas nasional. Pendekatan ini telah menyebabkan ketegangan dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional.

Pada masa kepemimpinan Moon Jae In, pemerintahan Korea Selatan memiliki pendekatan lebih progresif yang menekankan keterbukaan terhadap

dialog rekonsiliasi dengan Korea Utara, bahkan jarang terlibat konflik besar meskipun pada dasarnya konflik di antara dua Korea tidak dapat sepenuhnya dihindari. Sedangkan pada masa peralihan kepemimpinan Yoon Seok Yeol pada Mei 2022 lalu, Korea Selatan lebih cenderung bersifat konservatif dalam merespons hubungan dengan Korea Utara, bahkan beberapa kali terlibat ketegangan. Dimana Yoon Seok Yeol cenderung lebih keras terhadap Korea Utara dengan lebih menekankan pada kebijakan pertahanan dan kerjasama militer dengan Amerika Serikat (VOA 2023)

Berbagai bentuk kebijakan yang pada hakikatnya diterapkan sebagai perisai keamanan nasional masing-masing Korea, dianggap sebagai sebuah ancaman stabilitas kawasan. Eksistensi aliansi militer gabungan AS-Korsel, yang salah satu alasan pembentukannya adalah untuk memperkuat kekuatan militer sebagai respons nuklir Korea Utara, dianggap sebagai ancaman oleh Korea Utara dan dinilai dapat memicu ketegangan kawasan. Selain itu, latihan militer gabungan yang seringkali dilakukan oleh Korea Selatan dan AS dianggap sebagai provokasi besar yang melanggar perjanjian pengurangan ketegangan militer antar-Korea. Meski begitu, Korea Utara tetap tidak gentar dalam mengembangkan rudal dan balistiknya. Dimana pengembangan alutsista tersebut merupakan bentuk upaya pertahanan diri rezim negaranya dalam menghadapi dinamika politik global yang tidak menentu (CNBC Indonesia 2020).

Pada awal 2023 lalu, rezim Korea Utara mengancam Korea Selatan dengan mengumumkan rencana untuk meningkatkan kemampuan rudal balistik antarbenua (ICBM) dan mengembangkan produksi persenjataan nuklirnya menjadi lebih signifikan. Selain itu, rezim Kim Jong Un juga melontarkan provokasi dengan

menyebutkan bahwasannya Korea Selatan merupakan “musuh yang tidak diragukan lagi”. Berbeda dengan Moon Jae In yang selalu mengutamakan dialog perdamaian dengan Korea Utara, dalam merespons provokasi tersebut Presiden Yoon Seok Yeol membentuk direktorat baru untuk mengembangkan tanggapan terhadap ancaman rudal dan nuklir Korea Utara. Bahkan, Yoon berdiskusi dengan AS atas kemungkinan penyelenggaraan latihan nuklir bersama. Hal ini tentu mencederai Deklarasi Panmunjom yang menekankan pentingnya pemeliharaan hubungan inter-Korea dengan menghentikan ketegangan militer kedua negara (DW 20223).

Provokasi lain yang dilakukan Korea Utara adalah peluncuran satelit pengintai militer ke orbit, yang di berhasil meningkatkan kembali intensitas ketegangan Semenanjung Korea. Dalam hal ini Korea Utara di bantu oleh Rusia dalam mengembangkan satelit tersebut. Tindakan ini dianggap telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, yang melarang penggunaan teknologi rudal balistik. Menanggapi hal ini, Korea Selatan merespons dengan mengguhkan sebagian dari Perjanjian Militer Komprehensif dua Korea (CMA), yang dibuat untuk mengatur penghentian seluruh aktivitas militer antar Korea, serta ditetapkannya zona penyangga maritim dan Zona Demiliterisasi sebagai kawasan perdamaian, pada tahun 2018. Dalam pertemuan rapat Dewan Keamanan Nasional, Perdana Menteri Han Duck-soo, menyatakan bahwasannya Pasal 1 Ayat 3 dalam perjanjian tersebut, yang menetapkan zona larangan terbang untuk semua jenis pesawat di atas Garis Demarkasi Militer (MDL), akan ditangguhkan. Sehingga, Korea Selatan dapat dengan segera melakukan pemulihan operasi pengintaian dan

pengawasan terhadap Korea Utara di sekitar wilayah Zona Demiliterisasi (Kim 2023).

Merespons segala aktivitas nuklir Korea Utara termasuk ICBM yang dinilai mengancam stabilitas Semenanjung Korea, pada tahun 2022 lalu, Amerika Serikat kembali memberikan sponsor pemberlakuan Resolusi sanksi yang diadopsi terakhir kali oleh DK PBB pada Desember 2017. Dalam hal ini, posisi China dan Rusia selaku anggota Dewan Keamanan PBB, serta sebagai kemitraan imperialis Korea Utara, telah memberikan veto untuk memblokir seluruh tindakan yang dilakukan kepada Korea Utara. China dan Rusia telah lama mendorong pengurangan sanksi terhadap Korea Utara, dengan alasan kemanusiaan (CNBC 2022).

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun menyatakan bahwa penerapan sanksi tambahan terhadap Korea Utara tidak akan memberikan manfaat. Menurutnya, langkah tersebut hanya akan memperburuk situasi dan meningkatkan konfrontasi. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva juga menyebutkan bahwasannya tindakan mengutuk Korea Utara merupakan pendekatan sepihak. Pihak Rusia juga menuduh AS mengerahkan mesin militernya ke Semenanjung Korea untuk operasi ofensif, yang kemudian hal ini di bantah oleh AS bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk bermusuhan. Rusia kembali menekankan bahwasannya penyelesaian damai konflik Semenanjung Korea harus dilakukan melalui cara diplomatik tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal yang memperumit situasi (CNBC 2022).

Berdasarkan uraian di atas, erat relevansinya dengan apa yang telah dikemukakan oleh Buzan mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur dasar kompleksitas keamanan kawasan dalam konteks anarkisme kawasan,

terhadap dinamika konflik Semenanjung Korea. Secara eksternal, anarkisme kawasan mengacu pada masuknya penetrasi dari aktor asing ke dalam suatu kawasan tertentu, dimana pengaruh interaksi dari aktor eksternal berperan dalam mempengaruhi kompleksitas kawasan. Dalam konteks ini, dalam kondisi yang anarki negara-negara di Semenanjung Korea memutuskan untuk membentuk aliansi dengan negara yang melakukan penetrasi ke wilayah tersebut.

Meskipun deklarasi tersebut menyiratkan upaya perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan, ancaman militer, uji coba senjata dan latihan militer yang intensif dari kedua Korea dan negara-negara lain di kawasan tersebut memperburuk situasi keamanan dan menghalangi upaya rekonsiliasi. Sebagai hasilnya, meskipun ada langkah-langkah menuju perdamaian, ketidakstabilan tetap menjadi masalah utama di Semenanjung Korea. Kemungkinan adanya perubahan rezim atau perubahan dalam kebijakan luar negeri Korea Utara dan Korea Selatan juga dianggap dapat menciptakan ketidakpastian tambahan dalam konflik Semenanjung Korea. Anarkisme kawasan di Semenanjung Korea terbentuk atas dasar kecurigaan yang melekat pada kedua belah pihak negara, ketika diantara salah satunya menerapkan kebijakan *self defense* demi melindungi kepentingan nasionalnya. Hal ini pada akhirnya, membuat penerapan Deklarasi Panmunjom menjadi belum efisien, sebab anarki yang tinggi di tingkat regional Semenanjung Korea mencerminkan ketidakpastian dan ketidakstabilan di kawasan tersebut.

BAB 3

**POLARITAS KEKUATAN DAN KONSTRUKSI SOSIAL DALAM
DINAMIKA KONFLIK SEMENANJUNG KOREA PASCA DEKLARASI
PANMUNJOM**

Mengingat pada penjelasan bab sebelumnya, bahwasannya kedekatan geografis dan anarkisme kawasan menjadi suatu elemen yang turut melatarbelakangi alasan mengapa konflik Semenanjung Korea masih dihadapkan pada ketidakstabilan. Maka dari itu, pada bab ketiga ini akan menganalisis secara komprehensif mengenai bagaimana dua variabel lain dalam teori *Regional Security Complex*, yakni polaritas kekuatan serta konstruksi sosial berperan sebagai pendukung kegagalan kedua negara Korea dalam mengimplementasikan Deklarasi Panmunjom.

Dinamika konflik di Semenanjung Korea dipengaruhi oleh polaritas kekuatan global dan konstruksi sosial yang kuat di kedua Korea. Pada aspek polaritas kekuatan, sebagai kawasan yang strategis, Semenanjung Korea menjadi medan pertarungan bagi berbagai kepentingan global, di mana kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Rusia memainkan peran kunci atas dinamika konflik yang berlangsung. Hal ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan distribusi kekuatan antara negara di Semenanjung Korea. Sedangkan pada aspek konstruksi sosial, narasi sejarah, identitas nasional, persepsi dan pola interaksi sebuah negara, memainkan peran penting dalam membentuk konflik di Semenanjung Korea.

3.1 Polaritas Kekuatan dalam Konteks Konflik Semenanjung Korea

3.1.1 Ketidakseimbangan Militer Dua Korea Sebagai Faktor Internal Polaritas Kekuatan

Pada teori *Regional Security Complex*, variabel polaritas kekuatan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana terjadinya ketidakmerataan distribusi kekuatan antara negara di suatu kawasan. Ketidakseimbangan polaritas menyebabkan terbentuknya pembagian kedudukan antara negara-negara dengan kekuatan militer yang lemah dan kuat. Negara-negara dengan kekuatan militer lemah cenderung lebih rentan terhadap potensi ancaman dari negara-negara dengan kekuatan militer yang kuat. Jika suatu negara tidak memiliki kemampuan dalam mengimbangi kekuatan negara lain, maka langkah yang dapat diambil adalah dengan menjalin kerjasama atau membentuk aliansi dengan negara lain, yang dianggap memiliki pengaruh “power” lebih besar. Dinamika kekuatan ini kemudian berperan dalam mempengaruhi pembentukan polaritas di suatu kawasan (Buzan Waever 2003, 47).

Pada konteks internal, variabel polaritas kekuatan pada dasarnya merujuk pada kapabilitas militer suatu negara. Apabila terdapat ketidakseimbangan atau kesenjangan militer di antara negara-negara dalam satu kawasan, hal itu bisa dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara lain dalam kawasan yang sama. Dalam situasi seperti ini, negara-negara yang merasa terancam akan merespons dengan meningkatkan kapabilitas militer mereka sendiri untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Ketidakseimbangan militer ini dilatarbelakangi oleh kemampuan masing-masing negara pada sektor perekonomian. Ketika suatu negara memiliki sektor perekonomian yang bagus maka langkah untuk meningkatkan

kapabilitas militernya menjadi lebih mudah. Hal ini akan mempengaruhi kerentanan yang ditimbulkan dari dalam negeri, apakah negara tersebut tergolong dalam sebuah negara yang kuat ataupun lemah (Buzan & Waever 2003, 51).

Ketidakseimbangan kekuatan militer antara Korea Utara dan Korea Selatan menjadi salah satu dinamika penting dalam sistem pertahanan Semenanjung Korea. Korea Utara dikenal memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir dengan baik dan menempati posisi ke-30 sebagai militer terkuat di dunia. Selain itu, Korea Utara juga telah mengembangkan program nuklir dan rudal balistik, yang dapat meningkatkan kapabilitas ancaman strategis di tingkat regional maupun global. Di lain sisi, Korea Selatan menduduki posisi ke-6 sebagai militer terkuat di dunia. Korea Selatan memiliki kekuatan militer yang modern, didukung oleh teknologi tinggi dan aliansi kuat dengan Amerika Serikat. Meskipun militer keduanya memiliki keunggulannya masing-masing akan tetapi ketidakseimbangan terjadi dalam jumlah personel dan kekuatan persenjataan militer (CNBC Indonesia 2022).

Sistem pertahanan Korea Utara mulai mengalami perkembangan signifikan pasca terjadinya Perang Korea. Peningkatan signifikan dalam kapabilitas pertahanan Korea Utara pertama kali terjadi pada awal tahun 1990-an, ketika pengembangan senjata nuklir pertama oleh Korea Utara mulai terungkap. Sebagai negara dengan angkatan militer yang dilengkapi dengan persenjataan nuklir, Korea Utara beberapa kali unjuk kekuatan sebagai bentuk gertakan kepada dunia internasional atas eksistensinya. Pengembangan misil dan balistik merupakan manuver Korea Utara untuk menunjukkan bahwa negaranya merupakan negara nuklir yang memiliki posisi sama dengan negara-negara lain. Uji coba rudal balistik yang kerap dilakukan oleh Korea Utara seringkali mendapat kecaman keras dari

dunia internasional, terlebih dari Korea Selatan yang letak geografisnya berdekatan langsung (KBS World 2017).

Ketidakseimbangan kekuatan militer dapat meningkatkan rivalitas dua Korea, sehingga berpotensi menciptakan situasi rentan terhadap konflik bersenjata atau kejadian yang tidak terduga. Rivalitas tersebut tercermin dari kontestasi kekuatan melalui pengadaan parade militer oleh masing-masing Korea. Parade militer Korea Utara dan Korea Selatan seringkali menjadi momen tegang di Semenanjung Korea. Kedua negara ini memiliki sejarah konflik panjang dan ketegangan politik yang berlarut-larut, sehingga setiap acara militer dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

Korea Utara sering menggunakan parade militer sebagai platform untuk menunjukkan kekuatan militer mereka kepada dunia luar, serta untuk menguatkan propaganda internal. Parade semacam itu sering kali melibatkan demonstrasi senjata-senjata besar, termasuk rudal-rudal dan artileri yang mengesankan. Sementara itu, Korea Selatan juga mengadakan parade militer sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga kesiapan militer dan menunjukkan kemitraan mereka dengan sekutu-sekutu regional dan internasional, terutama Amerika Serikat. Bagi Korea Selatan, parade militer juga merupakan cara untuk menegaskan kemandirian dan kemampuan pertahanan mereka sendiri (VOA 2023).

Tahun 2023 menjadi ajang adu kekuatan militer Korea Selatan dan Korea Utara. Pada bulan Juli, Korea Utara mengawali parade militer di Pyongyang, yang dihadiri oleh delegasi dari China dan Rusia, sebagai perayaan hari kemenangan yang menandai 70 tahun penandatanganan gencatan senjata Perang Korea. Pada parade ini, Korea Utara menampilkan berbagai misil yang dilengkapi dengan

kemampuan nuklir serta drone-drone produksi terbaru (DW 2023). Sedangkan Korea Selatan, melakukan parade militer berskala besar pada bulan September, dalam rangka memperingati 70 tahun aliansi dengan Amerika Serikat serta merayakan 75 tahun hari angkatan bersenjata. Pada parade ini, Korea Selatan memamerkan lebih dari 170 peralatan militer, mencakup kendaraan tak berawak, HARIMAU Angkatan Darat, pasukan mekanis, artileri, perlindungan dan pasukan amfibi (CNBC 2023).

Parade militer tersebut meningkatkan kewaspadaan masing-masing Korea atas peluang ancaman yang akan terjadi. Mereka akan saling mengawasi pergerakan masing-masing dan berdampak buruk pada peningkatan tensi ketegangan. Ketegangan akibat dilakukannya parade militer mencerminkan ketidakpastian politik di kawasan tersebut, yang sering kali memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga dan aktor global lainnya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan kekuatan militer di Semenanjung Korea merupakan tantangan penting dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Supaya implementasi Deklarasi Panmunjom dapat direalisasikan secara maksimal.

3.1.2 Persaingan Aliansi Dua Korea Sebagai Faktor Eksternal Polaritas

Kekuatan

Variabel polaritas dalam teori *Regional Security Complex*, dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan dinamika kekuatan dari setiap negara di suatu wilayah. Perbedaan power yang dimiliki suatu negara dalam kawasan akan menciptakan berbagai kemungkinan. Dalam hal ini, apabila sebuah negara tidak dapat mengikuti dinamika keseimbangan atas kekuatan tersebut, maka negara itu akan berisiko rentan terhadap ancaman dominasi dan ekspansi negara lain. Hal ini

yang kemudian membentuk polaritas kekuatan dalam satu kawasan. Polaritas yang terdapat didalam suatu kawasan dipengaruhi oleh penetrasi power dari negara yang berada diluar kawasan, sehingga negara dengan power lebih lemah akan memilih untuk beraliansi dengan negara yang memiliki power lebih besar. Masuknya keterlibatan kekuatan eksternal menjadi semakin intens terjadi dalam kondisi ini (Buzan & Waever 2003, 152).

Berada di satu wilayah yang sama dan dulunya merupakan negara yang tergabung dalam satu kesatuan, Korea Selatan dan Korea Utara kini memiliki nasib teritorial yang berbeda. Pola kesenjangan yang cukup signifikan menggambarkan bagaimana kondisi kedua negara Korea tersebut. Kesenjangan antara Korea Utara dan Korea Selatan menjadi salah satu perbedaan paling mencolok dalam sejarah modern, hal tersebut mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah sistem pertahanan keamanan negara, termasuk hubungan dua Korea dengan negara aliansi.

Sebagai wilayah strategis di kawasan Asia Timur, Semenanjung Korea menjadi “primadona” bagi berbagai kekuatan asing yang ingin menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Hadirnya campur tangan asing di kedua kubu Korea semakin mendukung kesenjangan kekuatan dalam kawasan. Kekuatan pertahanan negara yang kini dipimpin oleh Kim Jong-Un tersebut semakin meningkat pesat, pasca Korea Utara menjadi sekutu dekat China dan Rusia. Ketiga negara tersebut memiliki jalinan hubungan yang dinilai membahayakan bagi kestabilan geopolitik internasional, terlebih sesama negara komunis dengan kekuatan militer yang besar secara global (Suh 2007).

Menjadi koalisi yang letak perbatasannya saling berdekatan, Korea Utara, China dan Rusia bermitra dalam menangani isu teritorial serta pembentukan sistem

pertahanan keamanan negara, terlebih dalam menghadapi ancaman ekspansi AS di Asia Timur. China, Rusia dan Korea Utara saling bekerjasama memperluas kemampuan militer satu sama lain. Perluasan kerjasama militer antara ketiga negara berdampak signifikan pada geopolitik regional maupun global. China merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sedangkan Rusia, merupakan salah satu negara dengan teknologi militer canggih, kolaborasi antara keduanya dapat memberikan akses ke teknologi dan sumber daya yang penting bagi China. Sementara itu, bagi Rusia, kerjasama ini dapat menguatkan posisinya di Asia Timur dan membantu menandingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Sementara itu, Korea Utara memiliki kepentingan untuk mendapatkan dukungan teknologi dan sumber daya dari China dan Rusia dalam rangka menguatkan kemampuan militer mereka. Aliansi dengan kedua negara tersebut juga dapat memberikan jaminan keamanan bagi rezim Kim Jong Un. Namun, perluasan kerjasama militer ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga, terutama Jepang dan Korea Selatan, serta di kalangan negara-negara Barat. Situasi ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional dan memicu perlombaan persenjataan yang lebih luas. Kolaborasi militer antara China, Rusia, dan Korea Utara telah menjadi subjek spekulasi dan kekhawatiran di komunitas internasional. Kolaborasi diantara mereka mencakup kerjasama dalam bidang teknologi militer, perdagangan senjata, hingga pelatihan militer.

Kehadiran China dan Rusia sebagai sekutu Korea Utara yang memiliki persenjataan militer cukup signifikan, pada akhirnya membentuk pola kesenjangan kekuatan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kondisi ketidakseimbangan

kekuatan antara kedua negara Semenanjung Korea, pada akhirnya mengharuskan Korea Selatan meningkatkan kerjasama aliansi dengan AS dan Jepang secara konsisten. Kerja sama yang akan disetujui oleh ketiga negara di antaranya melibatkan pengaturan sistem pertahanan rudal balistik serta kemajuan dalam teknologi pertahanan lainnya.

Meskipun pada dasarnya, hubungan Korea Selatan-Jepang masih diwarnai oleh perselisihan akibat sejarah konflik di masa lalu, Presiden Yoon menyatakan bahwa negaranya bersedia secara terbuka mengatasi perselisihan historis dengan Jepang demi kepentingan masa depan yang lebih baik. Hal ini disampaikan Presiden Yoon pada tahun 2023 lalu, saat Korea Selatan memperingati kemerdekaannya ke-78 setelah 35 tahun berada di bawah kekuasaan Jepang pada tahun 1945. Presiden Yoon menegaskan bahwa Korea Selatan akan bekerjasama secara lebih intens dengan Jepang dan AS di bidang pertahanan, untuk mencegah kemungkinan Korea Utara melakukan penyerangan secara masif ke Korea Selatan.

Sebagai kekuatan yang peranannya paling dominan, Amerika Serikat berupaya untuk memberikan perlindungan kepada sekutu dekatnya Korea Selatan dan Jepang dari ancaman aktivitas nuklir Korea Utara yang semakin meningkat. AS telah memberikan bantuan militer signifikan kepada Jepang dan Korea Selatan dalam bentuk perlengkapan militer, teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka terhadap ancaman, termasuk ancaman nuklir. Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang beberapa kali melaksanakan latihan militer gabungan, selain sebagai bentuk upaya memperkuat jalinan kerjasama militer, latihan gabungan juga dilakukan sebagai upaya bersama dalam

meningkatkan kemampuan dan kesiapan perang dalam menghadapi ancaman regional.

Pada 2022 lalu, Korea Selatan dan AS melakukan latihan gabungan militer terbesar di tengah meningkatnya ketegangan Semenanjung Korea. Latihan gabungan tersebut mendapat respons berupa kecaman keras dari pihak Korea Utara yang secara konsisten menganggap sebagai provokasi ancaman keamanan kawasan. Bahkan, Korea Utara secara terbuka melaksanakan uji coba senjata peluncuran rudal balistik (DW 2022). Pada tahun 2023 lalu, Korsel-AS-Jepang mengadakan latihan udara trilateral pertama yang dilesenggarakan di sekitar Semenanjung Korea, sebagai respons terhadap perkembangan ancaman nuklir Korea Utara. Latihan gabungan tersebut memiliki tujuan untuk menerapkan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat oleh ketiganya. Ketiga negara tersebut berupaya meningkatkan kolaborasi dalam bidang pertahanan serta kemampuan respons bersama untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara (VOA 2023).

Secara eksternal, polaritas kekuatan yang terdapat dalam satu kawasan dipengaruhi oleh masuknya keterlibatan asing dari luar kawasan. Polaritas kekuatan memiliki dampak yang signifikan bagi ketidakstabilan kawasan, sebab, masuknya intervensi asing membentuk strata kekuatan berupa negara dengan militer lemah akan kalah dengan negara militer kuat apabila tidak dapat mengimbangnya. Dalam konteks keamanan yang rumit ini, jika suatu negara merasa takut dan terancam, negara tersebut akan berusaha meningkatkan kemampuan militer mereka, untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Apabila salah satu negara merasa terancam akan bergabung dengan negara lain untuk membentuk aliansi pertahanan.

Pada konteks ini, Korea Utara dan Korea Selatan dinilai memiliki ketidakseimbangan kekuatan dalam hal pertahanan negara. Dimana Korea Utara memiliki kekuatan militer dengan persenjataan nuklir, sedangkan Korea Selatan memiliki beragam persenjataan militer yang canggih tanpa dilengkapi senjata nuklir. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya membuat intervensi kekuatan asing terlibat dalam mendukung kebijakan pertahanan keamanan masing-masing Korea, dengan membentuk sistem pertahanan bersama atau aliansi.

Korea Selatan beraliansi dengan Amerika Serikat dan Jepang, sedangkan Korea Utara dengan Rusia dan China. Ketidakseimbangan polaritas kekuatan ini, menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan distribusi kekuatan di antara negara dalam satu kawasan dan negara yang tergabung dalam aliansi. Kerumitan situasi Semenanjung Korea setelah masuknya berbagai keterlibatan kekuatan eksternal, pada akhirnya memainkan peran dalam mendukung kegagalan kedua negara Korea dalam menciptakan rezim perdamaian yang abadi.

3.2 Konstruksi Sosial dalam Konteks Konflik Semenanjung Korea

3.2.1 Kompleksitas Hubungan Inter-Korea Sebagai Faktor Internal Konstruksi Sosial

Dalam teori *Regional Security Complex*, terbentuknya kompleksitas keamanan suatu kawasan didasarkan pada tingkatan pola *amity* dan *enmity* yang terjalin antara negara-negara bagian di suatu wilayah tertentu. Kelompok negara yang letak geografisnya saling berdekatan dan sering terlibat masalah keamanan, cenderung memiliki ketergantungan satu sama lain. Mereka akan saling mengawasi pergerakan antar negara sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman yang akan terjadi di masa mendatang. Di lain sisi, negara-negara tersebut memiliki rasa saling

ketergantungan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor internal seperti halnya geografis, ekonomi, politik, etnisitas dan budaya. Hal ini secara terstruktur akan berkontribusi dalam mempengaruhi perkembangan sistem pertahanan keamanan kawasan (Buzan & Waever 2003, 53)

Secara internal, interaksi yang melibatkan sebuah negara menjadi acuan dasar untuk menilai bagaimana pola hubungan yang terjalin antara negara-negara tersebut. *Amity* merujuk pada hubungan antar negara yang dibangun berdasarkan rasa saling percaya, sehingga menimbulkan ketergantungan yang diperlihatkan melalui harapan dukungan kerjasama serta intensi perlindungan keamanan. Sedangkan *enmity* mengacu pada hubungan antar negara berdasarkan rasa saling curiga dan permusuhan. Pola hubungan *amity* dan *enmity* terbentuk dari keterikatan rekam jejak sejarah konflik di masa lalu baik yang bersifat positif maupun negatif, serta adanya benturan berbagai kepentingan yang mendominasi.

Pola hubungan *amity* dan *enmity* antar negara dapat berkelanjutan ketika hal ini dikorelasikan dengan karakter historis yang melekat antara individu dalam satu kawasan, seperti yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sejarah hubungan yang melekat diantara keduanya memiliki siklus yang kompleks akibat perang Korea yang terjadi di masa lampau. Terlebih adanya signifikansi perbedaan ideologi, kebijakan politik, karakteristik sosial dan budaya, serta ketimpangan pertumbuhan perekonomian, yang membuat dua Korea kerap dihadapkan pada tensi ketegangan yang intens.

Selama beberapa dekade terakhir, interaksi yang terjalin antara Korea Utara dan Korea Selatan telah diwarnai pola hubungan yang rumit antara *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Jika dikaji secara historis, sebagai negara

yang dulunya pernah bersatu kedua negara ini memiliki ikatan kuat perihal etnis dan budaya. Akan tetapi, pemisahan kedua negara Korea pada tahun 1945 silam, menakdirkan mereka ke arah yang berbeda. Kini Semenanjung Korea kerap dihadapkan pada situasi anarki, akibat ketidakseimbangan yang mencolok di kedua sisi Korea. Dalam sejarah geopolitik Asia Timur, pola *amity* dan *enmity* kedua negara Semenanjung Korea merupakan aspek yang paling kompleks.

Aspek *amity* Korea Selatan dan Korea Utara tercermin dari adanya rasa saling ketergantungan antara kedua negara pada aspek perekonomian. Korea Selatan dikenal sebagai kekuatan besar dalam perekonomian global, pemerintah *Negeri Ginseng* saling bekerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan pendapatan nasionalnya. Keberhasilan itu terlihat dari peranan aktif Korea Selatan dalam perdagangan internasional melalui aktivitas ekspor impor. Sementara itu, Korea Utara terkenal akan pemerintahan yang terisolasi dari dunia internasional sehingga sering mengalami kesulitan pada aspek perekonomian.

Pola *amity* keduanya pertama kali dimulai ketika Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani Deklarasi *South-North Joint Declaration* pada tahun 2000. Deklarasi tersebut membuka jalan kerjasama bagi kedua Korea di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Pada tahun 2018 silam, Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pertemuan untuk berdiskusi terkait kebijakan memperbarui kontrak kerjasama perekonomian kedua negara. Hal ini meliputi penghubungan kembali jalanan rel kereta api, serta meneruskan kerjasama di Zona Industri Kaesong yang sempat terancam operasionalnya pasca terjadi insiden pengusiran pejabat Korea Selatan oleh Korea Utara di kawasan tersebut (CNN Indonesia 2018).

Pola *amity* lain tercermin dari kegigihan Semenanjung Korea dalam mengupayakan reunifikasi dua Korea melalui Deklarasi Panmunjom. Misalnya, tahun 2018 silam kedua negara Korea berkontribusi dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. Olimpiade ini dinilai sebagai olimpiade perdamaian, dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah olimpiade, atlet kedua Korea bergabung kedalam satu tim yang sama. Keterlibatan Korea Utara dalam acara olahraga musim dingin ini dianggap sebagai indikasi membaiknya hubungan bilateral Semenanjung Korea (BBC 2018).

Sedangkan pola *enmity* dapat digambarkan dalam realita instabilitas isu Semenanjung Korea. Dalam konteks hubungan inter-Korea, pola *enmity* dianggap memainkan peran paling dominan terhadap dinamika yang terjadi jika dibandingkan dengan *amity*. Dapat dilihat dari tingginya tingkat ketegangan yang mewarnai hubungan keduanya daripada pola persahabatan yang ditunjukkan oleh Korea Selatan dan Korea Utara. Sikap agresif Korea Utara terhadap pengembangan senjata nuklir menjadi pemicu utama keberlanjutan pola *enmity* kedua negara. Minimnya kepercayaan yang menyelimuti hubungan Korea Selatan dan Korea Utara membuat masing-masing negara memiliki pasukan militer dengan kapasitas besar yang terletak di sepanjang garis DMZ, hal tersebut berdampak pada terjadinya ketegangan militer di kawasan Semenanjung Korea. Berbagai tindakan provokasi dan propaganda yang saling diberlakukan mencerminkan kuatnya pola *enmity* dalam hubungan inter-Korea.

Pada akhirnya konstruksi sosial ini menciptakan terbentuknya kategorisasi “negara sahabat” (*amity*) dan “negara musuh” (*enmity*). Dan berimbas terjadinya skeptisisme dalam jalinan hubungan antar negara, yang memicu dilema keamanan.

Menjadi salah satu bentuk respon dari adanya pola *amity* dan *enmity* setiap negara akan meningkatkan *nation branding* serta kualitas kebijakan pertahanan nasionalnya (Buzan & Waever). Konstruksi sosial berupa pola *amity* dan *enmity* yang saling berkaitan melatarbelakangi kompleksitas konflik Semenanjung Korea pasca penetapan Deklarasi Panmunjom.

3.2.2 *Intervensi Asing Sebagai Faktor Eksternal Konstruksi Sosial*

Dalam teori *Regional Security Complex*, Barry Buzan menyatakan bahwasannya untuk mendefinisikan keamanan secara regional, harus terlebih dahulu memahami dua pola hubungan yang terjalin antara negara-negara di dalam kawasan itu sendiri. Dalam hal ini, konstruksi sosial diperlihatkan melalui pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan), yang terbentuk akibat dampak dari sejarah konflik di masa lalu. Unsur terpenting yang melatarbelakangi terbentuknya kompleksitas keamanan kawasan adalah adanya pola interaksi saling ketergantungan serta keterkaitan hubungan kerjasama keamanan antar negara-negara yang terlibat. Jalinan hubungan yang terjadi antar negara tersebut, tidak lepas dari interaksi yang dipenuhi persaingan, kecurigaan, berbagai kubu aliansi kekuatan, perimbangan kekuasaan, hingga masuknya berbagai keterlibatan campuran eksternal (Buzan & Waever 2003, 47 & 53).

Intervensi asing mempersulit realisasi rezim perdamaian yang berkelanjutan di Semenanjung Korea. Berbagai kepentingan geopolitik dari negara-negara luar memperumit negosiasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Selain itu, campuran asing juga bisa memengaruhi dinamika internal dua Korea, sehingga menghambat kemajuan menuju perdamaian yang stabil. Dalam konteks ini, keterlibatan negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia

menjadi faktor penentu dalam upaya perdamaian. Pengelompokan keterlibatan negara asing di Semenanjung Korea di latarbelakangi oleh pola hubungan *amity* dan *enmity* yang terbentuk antara kedua Korea.

Pola *amity* dan *enmity* antara kedua negara Semenanjung Korea pada akhirnya memicu masuknya keterlibatan pihak eksternal, yang bergabung sesuai dengan persepsi “negara teman ataupun “negara musuh”. Keterlibatan pihak eksternal bisa berwujud aliansi keamanan, yang terbentuk karena adanya kebutuhan internal masing-masing Korea untuk mencapai keseimbangan kekuatan. Dalam hal ini, Korea Selatan beraliansi dengan Amerika Serikat dan Jepang, sedangkan Korea Utara bersekutu dekat dengan sesama negara komunis, Tiongkok dan Rusia. Masing-masing aliansi pertahanan yang terjalin memperkuat pola hubungan *enmity* antara kedua negara Korea. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal dapat berupa kerjasama di berbagai bidang, yang terjadi karena adanya sifat saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini menggambarkan pola *amity* dari adanya intervensi asing akan berdampak pada tingkat peluang kerjasama Korea Utara dan Korea Selatan semakin meluas, baik dalam aspek pertahanan keamanan maupun kerjasama ekonomi (Buzan & Waeber 2003, 44).

Sebagai kekuatan global hegemoni Amerika Serikat telah mengintervensi konflik Semenanjung Korea. Kehadirannya di tengah-tengah ketegangan Korea Selatan dan Korea Utara mempengaruhi negosiasi dan kebijakan regional, serta menciptakan hambatan jika ada perbedaan pendapat atau kepentingan nasional yang bertentangan. Pada saat berada di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat cenderung mengambil pendekatan yang lebih progresif, dalam hal ini Trump lebih sering melakukan langkah-langkah diplomatik secara

langsung. Pada masa kepemimpinan Trump, Amerika Serikat memiliki jalinan interaksi yang lebih baik dengan Korea Utara, dimana pihaknya lebih sering terlibat dalam pertemuan secara langsung dengan Kim Jong Un, untuk membahas denuklirisasi. Pertemuan puncak antara keduanya yang pertama diadakan pada Juni 2018 di Singapura, yang diikuti oleh pertemuan lainnya di Hanoi, Vietnam, pada Februari 2019 dan pertemuan ketiga di Zona Demiliterisasi Korea pada Juni 2019. Pada masa kepemimpinan Trump, Amerika Serikat lebih menekankan sanksi ekonomi dalam merespons nuklir Korea Utara (VOA 2019).

Di lain sisi, pada masa peralihan kepemimpinan oleh Joe Biden, Amerika Serikat cenderung memberlakukan sistem konservatif terhadap Korea Utara, yang menyebabkan kedua negara sering terlibat dalam ketegangan. Bahkan, selama tahun 2023 Amerika Serikat secara aktif melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan di kawasan perbatasan, yang pada akhirnya menyulut kemarahan Korea Utara dan menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan “deklarasi perang”. Pernyataan tersebut juga dikatakan Korea Utara sebagai respons atas tindakan Diplomat AS yang menekan PBB untuk mengutuk uji coba senjata rudal Pyongyang (CNBC 2023).

Sementara itu, menjadi negara senasib yang terkena sanksi global, Moskow akibat perang Ukraina sedangkan Pyongyang dengan ambisi uji coba nuklirnya, membuat Korea Utara memperkuat hubungan aliansi secara komprehensif dengan Rusia, yang disepakati pada tahun 2023. Aliansi antara Korea Utara dan Rusia terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan dalam upaya mengatasi kelemahan masing-masing negara. Aliansi tersebut menekankan pada peningkatan kerja sama militer yang pada akhirnya meningkatkan kekhawatiran Korea Selatan akan potensi

ancaman pertahanan keamanan negaranya di masa mendatang. Situasi ini meningkatkan pola hubungan *enmity* di antara dua Korea (CNBC 2023).

Secara eksternal, pola hubungan *amity* dan *enmity* dipengaruhi oleh hadirnya keterlibatan kekuatan asing yang mengintervensi, yang pada akhirnya dapat memicu perubahan dalam keseimbangan kekuatan regional maupun global, sehingga mempengaruhi persepsi dan interaksi antara negara-negara yang terlibat. Pada konteks ini, keterlibatan kekuatan asing dalam konflik Semenanjung Korea akan memperkuat salah satu pihak yang terlibat, sehingga berpotensi memperpanjang konflik keduanya. Misalnya, dukungan militer atau finansial dari kekuatan asing kepada salah satu Korea dalam konflik dapat membuat salah satu pihak merasa terancam sehingga meningkatkan hubungan *enmity*. Di sisi lain, kehadiran kekuatan asing juga dapat menjadi katalisator untuk pembentukan aliansi antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi dinamika geopolitik dan membentuk hubungan *amity* yang baru (Buzan & Waever 2003, 49).

Pasca penandatanganan Deklarasi Panmunjom, Semenanjung Korea lebih banyak menunjukkan pola hubungan yang bersifat *amity*. Itikad baik dari kedua pihak ditunjukkan melalui upaya reunifikasi, serta penerapan berbagai upaya damai yang telah disepakati dalam Deklarasi Panmunjom. Deklarasi ini telah membuka jalan bagi kedua Korea dalam meningkatkan lebih banyak kerjasama serta dialog diplomatik menuju perdamaian dan stabilitas. Pola *amity* kedua Korea tercermin dari meningkatnya berbagai kerjasama lintas batas, berupa kolaborasi di bidang olahraga, budaya, hingga ekonomi.

Akan tetapi, pola hubungan *enmity* antara kedua negara tetap tidak dapat dihindari. Sejarah perang yang melibatkan dua Korea serta konflik panjang di masa lalu menjadi kendala dalam menciptakan hubungan yang benar-benar damai dan harmonis. Terlebih hadirnya berbagai kekuatan asing di masing-masing pihak Korea mempengaruhi keseimbangan kekuatan, yang dapat meningkatkan intensitas ketegangan kedua negara. Dalam hal ini, intervensi asing telah membentuk pola *amity* dan *enmity* dalam dinamika konflik Semenanjung Korea. Pola *amity* dan *enmity* melandasi kurang optimalnya pemberlakuan kesepakatan Deklarasi Panmunjom bagi Korea Selatan dan Korea Utara, sehingga konflik keduanya masih dalam ketidakstabilan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sebelum terjadinya konflik ketegangan yang intensif akibat Perang Korea di masa lalu, Korea Selatan dan Korea Utara dulunya merupakan sebuah negara yang berada dibawah satu kedaulatan yang sama. Kedua negara Korea tersebut memiliki perbedaan yang signifikan pada aspek kebijakan politik, ideologi, pertahanan keamanan, sosial dan budaya, hingga pertumbuhan ekonomi. Meskipun kecurigaan dan ketegangan sudah menjadi pemandangan lumrah yang menggambarkan situasi hubungan antar Korea, berbagai upaya damai telah dilakukan demi terealisasinya rezim perdamaian Korea yang abadi. Misalnya saja, penandatanganan Deklarasi Panmunjom pada tahun 2018 menjadi tonggak sejarah yang mencerminkan usaha konkret keduanya dalam langkah awal untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Akan tetapi, dalam merealisasikannya terdapat kesulitan implementasi akibat berbagai faktor yang mendasari sehingga ketidakstabilan konflik masih terjadi hingga kini.

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan konsep teori *Regional Security Complex* oleh Buzan dkk, faktor-faktor internal maupun eksternal pada setiap variabel teori ini memainkan peran penting dalam dinamika konflik Semenanjung Korea, yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan keamanan dan hubungan antarnegara di wilayah tersebut. Teori *Regional Security Complex* Buzan, membantu mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor utama penyebab ketidakstabilan konflik Semenanjung Korea. Analisis penulis telah

memperoleh hasil jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengapa konflik Semenanjung Korea masih dihadapkan pada ketidakstabilan pasca Deklarasi Panmunjom tahun 2018-2023.

Teori *Regional Security Complex* menekankan bahwa negara-negara yang memiliki kedekatan geografis berpotensi mengalami tantangan realita konflik yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan negara-negara yang terpisah secara geografis. Variabel ini merupakan konsep dasar yang membentuk pola interaksi antar negara. Dalam konteks konflik Semenanjung Korea, variabel kedekatan geografis poin internal mengacu pada kedekatan posisi geografis antara Korea Selatan dan Korea Utara yang hanya dipisahkan oleh garis perbatasan di Zona Demiliterisasi (DMZ), memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika geopolitik keduanya. Sedangkan pada poin eksternal, batas wilayah Semenanjung Korea yang terletak di antara China dan Jepang, membuat Korea Selatan dan Korea Utara rentan mengalami tensi ketegangan. Sebab, China dan Jepang memiliki kepentingan strategis yang berbeda di wilayah tersebut, terlebih adanya keterikatan sejarah kuat diantara masing-masing negara.

Kedekatan geografis pada akhirnya menentukan bagaimana pola interaksi antar negara dalam satu kawasan. Dalam hal ini, hubungan yang terjalin antara Korea Selatan dan Korea Utara cenderung bersifat anarki. Dimana ketika masing-masing Korea mengeluarkan kebijakan keamanan yang bersifat provokatif, akan memicu respon ketegangan akibat tingginya kecurigaan yang melekat di antara kedua negara. Akibat adanya rasa saling curiga membuat terbentuknya polaritas kekuatan. Pada poin internal variabel ini, ketidakseimbangan polaritas tercermin dari kesenjangan kedudukan militer antara Korea Selatan dan Korea Utara. Militer

Korea Utara dilengkapi oleh persenjataan nuklir dan rudal balistik, yang dapat meningkatkan tensi ketegangan kawasan. Ketidakseimbangan kekuatan yang menjadi permasalahan utama pemicu ketegangan Semenanjung Korea, menimbulkan terjadinya campur tangan kekuatan asing. Hal ini pada akhirnya mempertemukan berbagai kepentingan strategis sebagai peran sentral dalam pembentukan aliansi dan konfrontasi. Dapat dilihat tingginya tingkat persaingan aliansi antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang, dengan aliansi Korea Utara, Rusia dan China, mencerminkan dinamika keamanan yang rumit.

Jika digambarkan secara komprehensif, pola hubungan Korea Selatan dan Korea Utara bersifat *amity* dan *enmity*. Pada konteks internal, rekam jejak sejarah konflik di masa lalu membuat hubungan keduanya sering dihadapkan pada ketidakstabilan. Korea Utara dan Korea Selatan seringkali berada dalam tensi ketegangan yang memanas, namun di lain sisi keduanya masih terikat dalam hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Sedangkan intervensi asing yang terlibat dalam hubungan inter-Korea menggambarkan poin eksternal yang membentuk pola *amity* dan *enmity* kedua negara.

Secara garis besar, alasan mengapa Deklarasi Panmunjom belum dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan ada banyak unsur ketegangan serta intervensi asing yang mempengaruhi kemajuan implementasinya. Selain itu, ketidakpastian politik internal Korea Utara yang tidak dapat diprediksi, serta perbedaan ideologi dan sistem yang diberlakukan antara kedua Korea turut memainkan peran mengapa deklarasi ini belum terealisasi secara maksimal. Dalam merealisasikannya Deklarasi Panmunjom telah menghadapi beberapa hambatan dan tantangan. Proses perdamaian di Semenanjung Korea adalah langkah yang

rumit dan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat, termasuk dua negara Korea serta berbagai aktor internasional lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan alasan mengapa Semenanjung Korea masih dihadapkan pada ketidakstabilan, meski telah dilakukan penandatanganan Deklarasi Panmunjom, dilatarbelakangi oleh empat variabel yang meliputi kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan, hingga konstruksi sosial. Pemberian respon berupa tindakan agresif bukanlah suatu jalan keluar yang solutif dalam upaya memperbaiki hubungan dua Korea. Dalam hal ini perbedaan kebijakan dalam menanggapi isu Semenanjung Korea, antara presiden Moon Jae In dengan Yoon Suk Yeol, serta faktor-faktor regional yang bersifat internal maupun eksternal, dianggap memainkan peran penting dalam mempengaruhi kompleksitas konflik dan keamanan regional Semenanjung Korea.

Tabel 1. Operasionalisasi Teori *Regional Security Complex*

Variabel	Penjelasan Menurut Buzan & Waever	Operasional Dalam Konflik Semenanjung Korea
Kedekatan Geografis	Suatu wilayah dimana proses-proses sekuritisasi dan desekuritisasi serta interaksi negara-negara di dalamnya memiliki keterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> - Semenanjung Korea hanya dipisahkan oleh garis DMZ, membuat kecurigaan menjadi intens - Posisi Semenanjung Korea yang berada di dekat China dan Jepang, membentuk pola ketergantungan keamanan kompleks
Anarkisme Kawasan	Situasi dimana tidak adanya otoritas sentral yang mengatur interaksi antar negara	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya dominasi kedua Korea dalam membentuk hierarki - Penetrasi asing di masing-masing sisi Korea
Polaritas Kekuatan	Situasi dimana terjadinya ketidakmerataan distribusi kekuatan antara negara-negara dalam satu kawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketidakseimbangan kekuatan militer dua Korea. - Terbentuknya aliansi pertahanan oleh masing-masing Korea
Konstruksi Sosial	Diperlihatkan melalui pola <i>amity</i> (persahabatan) dan <i>enmity</i> (permusuhan) akibat dampak dari sejarah konflik di masa lalu	<ul style="list-style-type: none"> - Pola hubungan <i>amity</i> dan <i>enmity</i> yang tercermin dalam kompleksitas hubungan inter-Korea - Hadirnya intervensi asing membentuk dinamika geopolitik Semenanjung Korea menjadi semakin kompleks

Sumber: Barry Buzan & Ole Weaver 2003

4.2 REKOMENDASI

Setelah menguraikan analisis yang telah peneliti tulis pada bab-bab sebelumnya, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca secara lebih luas. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan perkembangan informasi secara mendalam mengenai bagaimana situasi dan kondisi Semenanjung Korea pada masa kini pasca penandatanganan Deklarasi Panmunjom, akibat keterbatasan periode tahun yang diteliti. Maka dari itu penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan informasi terkini terkait upaya reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu, penulis juga merekomendasikan supaya peneliti selanjutnya dapat menguraikan secara lebih komprehensif menggunakan sudut pandang yang lain, mengenai apakah hingga kini efektivitas Deklarasi Panmunjom masih mempengaruhi dinamika konflik Semenanjung Korea dan bagaimana kelanjutan prospek penyelesaian konflik antar kedua negara Korea di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Buku

- Monday, Putri I., and Hamdan N. Rosyida. (2022). *MOTIF MOON JAE IN DALAM MEREKONSILIASI HUBUNGAN KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA MELALUI KOREAN PENINSULA PEACE INITIATIVE* 8 (10): 75.
- Indriana Kartini. (2018). *Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un* 15 (6): 7.
- Mega Aldikawati. (2015). *MASA DEPAN REUNIFIKASI KOREA (Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin)* 1:34-35.
- Al Syahrin, M.Najeri. (2018). *Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerjasama Keamanan Asia Timur*. Nation State Journal of International Studies Vol.1 No.1
- Kartini, Indriana. (2018). *Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae In dan Kim Jong Un*. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 15, No.1.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B. & Waeber, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*, New York: Cambridge University Press.
- Cummings, Bruce,. (2011). *The Korean War: A History*, Modern Library Paperback Edition.
- Kwi-Gon Kim, Dong-Gil Cho. (2005). *Status and ecological resource value of the Republic of Korea's De-militarized Zone*. Landscape and Ecological Engineering Publishers.
- Cho, S.-R. (2009). *North Korea's Security Dilemma and Strategic Options*. The Journal of East Asian Affairs. Institute for National Security Strategy.
- Kim, S.-H. (2007). *North Korea: Between Survival and Glory*. Journal of Korean Studies, 12(1), 186–198.

- Park, K.-A. (2001). *North Korea's Defensive Power and U.S.-North Korea Relations*. In *Korean Security Dynamics in Transition* (pp. 83–104). New York: Palgrave Macmillan US.
- Trading Economics. (2018). *South Korea Military Expenditure*. 1953-2018. Data Chart Calendar.
- Don Oberdorfer. (2001). *The Two Koreas: A Contemporary History*. Basic Books.
- Bermudez, Joseph S. (2001). *Shield of the Great Leader*. The Armed Forces of North Korea.
- Al Syahrin, M.N. (2018). *Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara*. *Intermestic: Journal of International Studies*. Vol 2(2), pp.116-138.
- Armstrong, C.K. (2006). *US-North Korean Relations*, dalam J. Feffer(ed.) *The Future of US-Korean Relations*. Routledge London.
- Austin, G. & Harris, S. (2001). *Japan and Greater China: Political Economy and Military Power in the Asian Century*. University of Hawaii Press. Honolulu.
- Booth, K. & Wheeler, N. J. (2008). *The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics*. Palgrave Macmillan. London.
- Cho, S. R. (2009). *North Korea's Security Dilemma and Strategic Options*. *The Journal of East Asian Affairs*. Institute for National Security Strategy.
- Goo, Y.W. & Lee, S.H. (2014). *Military Alliances and Reality of Regional Integration: Japan, South Korea, the US vs. China, North Korea*. *Journal of Economics Integration*, vol. 29, no. 2, pp. 332-347.
- Myers, R.J. (2001). *Korea in the Cross Currents: A Century of Struggle and the Crisis of Reunification*. Palgrave. New York.
- Suh, J.J. (2007). *Power and Alliance: Assessing Military Balance in Korea*. In *Power, Interest, and Identity in Military Alliance*. Palgrave Macmillan. New York.
- Veronika, N.W. (2011). *Dari Uang ke Senjata: Kompetisi Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Keamanan Kawasan Asia Pasifik*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol. 7(2), pp. 159-163
- Yoon Y.S. & Setiani, N. A. (2003). *Sejarah Korea Sejak Masa Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Website Resmi

“Tanya Jawab: Korea Utara, Sanksi, dan Hak Asasi Manusia.” 2018. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2018/05/30/318511>.

“KTT antar-Korea | Semenanjung Korea, A to Z | KBS WORLD Radio.” n.d. KBS WORLD.

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2018_1.htm?lang=i.

“KOREAN CULTURAL CENTER.” n.d. KOREAN CULTURAL CENTER., . <https://id.korean-culture.org/id/115/korea/57>.

Jang, H. J. 2010. “*Overview of the Korean War and its Legacy*.” n.d. SPICE - Stanford.

https://spice.fsi.stanford.edu/docs/overview_of_the_korean_war_and_its_legacy.

CNN Indonesia. 2018. “DMZ, Zona Demiliterisasi Korea yang Penuh Misteri.” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180427051936-113-293990/dmz-zona-demiliterisasi-korea-yang-penuh-misteri>.

CNN Indonesia. 2018. “Korut-Korsel Lakukan Pertemuan, Perbarui Kerjasama Ekonomi.”

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181015130940-113-338541/korut-korsel-lakukan-pertemuan-perbarui-kerjasama-ekonomi>.

CNBC Indonesia. 2020. “Korut-Korsel Terancam Perang, Menteri Unifikasi Korsel Mundur.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200619191415-4-166735/korut-korsel-terancam-perang-menteri-unifikasi-korsel-mundur>.

BBC Indonesia. 2020. “Korut 'ledakkan kantor penghubung' dengan Korsel dekat perbatasan.” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53059907>.

BBC Indonesia. 2022. “Mengapa Rusia dan Korea Utara memperkuat hubungan diplomatiknya?” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5q4ejz9evo>.

BBC World. 2016. “US and South Korea agree THAAD missile defence deployment”. <https://www.bbc.com/news/world-asia-36742751>.

- CNBC Indonesia. 2022. "20 Negara dengan Militer Terkuat di Dunia 2022, RI ke Berapa?" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220401072507-4-327827/20-negara-dengan-militer-terkuat-di-dunia-2022-ri-ke-berapa>.
- DW. 2022. "AS dan Korsel Gelar Latihan Militer Gabungan Terbesar". <https://www.dw.com/id/as-dan-korsel-gelar-latihan-militer-gabungan-terbesar/a-62882994>.
- VOA Indonesia. 2021. "Aktivis Korsel Kirim Selebaran Propaganda Melintasi Perbatasan." <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-korsel-kirim-selebaran-propaganda-melintasi-perbatasan/5873140.html>.
- CNBC Indonesia. 2020. "Korea Utara-Selatan: Perang, Baik, Putus Hubungan." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200618153441-4-166325/korea-utara-selatan-perang-baik-putus-hubungan>.
- BBC. 2020. "Korea Utara dan Selatan saling tembak di perbatasan." <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52519954>.
- The Straits Times. 2018. "7 things to know about Panmunjom, the truce village where time stands still." <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/7-things-to-know-about-panmunjom-the-truce-village-where-time-stands-still>.
- VOA Indonesia. 2023. "Delegasi Rusia Berjanji Perkuat Hubungan dalam Kunjungan ke Korut." <https://www.voaindonesia.com/a/delegasi-rusia-berjanji-perkuat-hubungan-dalam-kunjungan-ke-korut/7359099.html>.
- BBC. 2018 "Korea Utara kirim adik Kim Jong-un hadir pembukaan Olimpiade di Korea Selatan." <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42973319>.
- VOA Indonesia. 2023. "Korea Utara Tangguhkan Perjanjian Militer dengan Korea Selatan Usai Luncurkan Satelit Mata-mata." <https://www.voaindonesia.com/a/korea-utara-tangguhkan-perjanjian-militer-dengan-korea-selatan-usai-luncurkan-satelit-mata-mata/7366921.html>.
- VOA Indonesia. 2023. "Korsel, Jepang, China Sepakat Mulai Kembali KTT Trilateral." <https://www.voaindonesia.com/a/korsel-jepang-china-sepakat-mulai-kembali-ktt-trilateral/7371419.html>.

- VOA Indonesia. 2023. “Korsel: Korut Berhasil Luncurkan Satelit Mata-mata Berkat Dukungan Rusia.” <https://www.voaindonesia.com/a/korsel-korut-berhasil-luncurkan-satelit-mata-mata-berkat-dukungan-rusia/7367113.html>.
- VOA Indonesia. 2023. “Korut Kirim Pasukan ke Perbatasan, Pulihkan Operasi Pos Penjagaan.” <https://www.voaindonesia.com/a/korut-kirim-pasukan-ke-perbatasan-pulihkan-operasi-pos-penjagaan/7371618.html>.
- VOA Indonesia. 2020. “Korut Putuskan Semua Jalur Komunikasi dengan Korsel.” <https://www.voaindonesia.com/a/korut-putuskan-semua-jalur-komunikasi-dengan-korsel/5455512.html>.
- VOA Indonesia. 2023. “Presiden Korea Selatan Peringatkan Soal Kerja Sama Militer Rusia-Korea Utara.” <https://www.voaindonesia.com/a/presiden-korea-selatan-peringatkan-soal-kerja-sama-militer-rusia-korea-utara/7272624.html>.
- VOA Indonesia. 2019. “Bertemu Kim di DMZ, Trump Lintasi Perbatasan Korea Utara.”. <https://www.voaindonesia.com/a/bertemu-kim-di-dmz-trump-lintasi-perbatasan-korea-utara/4979819.html>.
- n.d. YouTube: Home. Accessed February 25, 2024.
https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/07/27/china-korut-rusia-poros-persahabatan-demi-keamanan-persenjataan-dan-ekonomi?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&status_login=login.
- DW. 2023. “Apakah Asia Tenggara Perlu Aliansi Pertahanan Seperti NATO? – DW – 21.12.2023.” . <https://www.dw.com/id/apakah-asia-tenggara-perlu-aliansi-pertahanan-seperti-nato/a-67779076>.
- Bennett, Bruce W. 2023. “North Korea, Russia and China: The Developing Trilateral Imperialist Partnership.” RAND Corporation.
<https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/09/north-korea-russia-and-china-the-developing-trilateral.html>.
- Bennett, Bruce W. 2023. “North Korea and China Aren't the Allies You Think They Are.” RAND Corporation.

<https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/09/north-korea-and-china-arent-the-allies-you-think-they.html>.

Indo-Pacific Defense Forum. 2023. “*Jepang dan Korea Selatan memperkuat kerja sama rantai pasokan dan pertahanan.*”

<https://ipdefenseforum.com/id/2023/05/jepang-dan-korea-selatan-memperkuat-kerja-sama-rantai-pasokan-dan-pertahanan/>.

BBC. 2019. “*Kembali bertemu Trump, Kim Jong-un berangkat ke Vietnam menggunakan kereta.*” . <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47347488>.

CNBC Indonesia. 2023. “*Kesepakatan Setan' Rusia-Korea Utara Bikin Geng Barat Waswas.*” .

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230915083939-4-472664/kesepakatan-setan-rusia-korea-utara-bikin-geng-barat-waswas>.

VOA Indonesia. 2023. “*Korsel, AS, Jepang Adakan Latihan Udara Gabungan di tengah Ancaman Korut.*” . <https://www.voaindonesia.com/a/korsel-as-jepang-adakan-latihan-udara-gabungan-di-tengah-ancaman-korut/7322055.html>.

CNN Indonesia. 2019. “*Korsel Bakal Lanjutkan Kerja Sama Intelijen dengan Jepang.*” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191122193615-113-450765/korsel-bakal-lanjutkan-kerja-sama-intelijen-dengan-jepang>.

VOA Indonesia. 2023. “*Korsel Serukan Kerja Sama Keamanan Kuat dengan AS, Jepang Jelang KTT Camp David.*” .

<https://www.voaindonesia.com/a/korsel-serukan-kerja-sama-keamanan-kuat-dengan-as-jepang-jelang-ktt-camp-david/7225692.html>.

BBC. 2018. “*Pertemuan puncak Trump dan Kim Jong-un di Singapura: Empat hal yang perlu diketahui.*” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44397662>.

VOA Indonesia. 2023. “*Seoul Keraahkan Jet Setelah Pesawat Tempur China, Rusia Mendekat.*” . <https://www.voaindonesia.com/a/seoul-kerahkan-jet-setelah-pesawat-tempur-china-rusia-mendekat-/7397734.html>.

CNBC Indonesia. 2022. “*Panas! China-Rusia "Bersatu" di Sini, Pasang Badan Buat Korut.*” . <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220527063949-4-342125/panas-china-rusia-bersatu-di-sini-pasang-badan-buat-korut>.

DW. 2022. *“Cina dan Rusia Memveto Resolusi Usulan Amerika Serikat – DW .”*
<https://www.dw.com/id/cina-dan-rusia-memveto-resolusi-usulan-amerika-serikat/a-61946433>.

CNBC Indonesia. 2022. *“China & Rusia Bela Korut, Tuding AS sebagai Pembawa Masalah”*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220609120948-4-345638/china-rusia-bela-korut-tuding-as-sebagai-pembawa-masalah>.

VOA Indonesia. 2019. *“Trump, Presiden Korsel Bahas Denuklirisasi Semenanjung Korea di Gedung Putih”*.
<https://www.voaindonesia.com/a/trump-presiden-korsel-bahas-denuklirisasi-semenanjung-korea-di-gedung-putih/4872711.html>.